



# ANALISIS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN



**BADAN PUSAT STATISTIK**

# **ANALISIS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN**

<http://www.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**

## **ANALISIS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN**

ISBN :  
No. Publikasi :  
Katalog BPS :  
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman :

Naskah :  
Sub Direktorat Analisis Statistik

Gambar Kulit :  
Sub Direktorat Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :  
Badan Pusat Statistik RI

Dicetak Oleh :  
CV. Nario Sari

## KATA PENGANTAR

Publikasi Analisis Disparitas Input Pembangunan ini berisi analisis yang mengkaji peringkat input pembangunan tiap-tiap provinsi. Analisis ini merupakan lanjutan dari Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi yang terbit tahun 2002 dan 2009. Disparitas tingkat hidup merupakan potret kesenjangan pembangunan dari sisi output, sedangkan disparitas input pembangunan merupakan potret kesenjangan pembangunan dari sisi input.

Disparitas input pembangunan diukur melalui indeks komposit. Seleksi variabel pengukur disparitas input pembangunan dilakukan melalui tahapan uji validitas, uji reliabilitas, dan seleksi variabel normatif. Selanjutnya berdasarkan variabel yang lolos seleksi, dihitung indeks komposit dengan menggunakan metode taksonomik. Analisis dilakukan dengan mengamati peringkat indeks komposit dimana nilai ideal masing-masing variabel digunakan sebagai nilai acuan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya, analisis juga dilakukan dengan melihat keterkaitan disparitas tingkat hidup dengan disparitas input pembangunan.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan analisis di masa yang akan datang. Terimakasih diucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini.

Jakarta, Desember 2010  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Republik Indonesia

Dr. Rusman Heriawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan Penulisan.....	6
1.3. Ruang Lingkup.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>II. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>9</b>
2.1. Pembangunan.....	11
2.1.1. Konsep Pembangunan.....	11
2.1.2. Tujuan Pembangunan.....	13
2.1.3. Pembangunan Kewilayahan.....	14
2.1.4. Input Pembangunan.....	16
2.2. Kesejahteraan.....	18
2.2.1. Konsep Kesejahteraan.....	18
2.2.2. Kesejahteraan Rakyat.....	19
2.3. Disparitas.....	21
2.3.1. Konsep Disparitas.....	21
2.3.2. Disparitas Antar Wilayah.....	23
<b>III. Metodologi</b> .....	<b>27</b>
3.1. Sumber Data.....	29
3.2. Kerangka Pikir Penelitian.....	29
3.3. Seleksi Variabel Pengukur.....	34
3.3.1. Uji Validitas.....	34
3.3.2. Uji Reliabilitas.....	35
3.3.3. Seleksi Variabel Normatif.....	37
3.4. Metode Penghitungan Indeks Komposit.....	37
3.5. Metode Analisis.....	45

<b>IV. Hasil Dan Pembahasan</b> .....	<b>47</b>
4.1. Hasil Seleksi Variabel Pengukur .....	49
4.1.1. Hasil Uji Validitas .....	49
4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas .....	49
4.1.3. Hasil Seleksi Variabel Normatif .....	51
4.2. Disparitas Input Pembangunan .....	51
4.2.1. Disparitas Input Pembangunan Per Dimensi .....	51
4.2.1.1. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Sumber Daya Alam .....	51
4.2.1.2. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Infrastruktur .....	55
4.2.1.3. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Perekonomian .....	59
4.2.1.4. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Sumber Daya Manusia .....	63
4.2.1.5. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Kelembagaan dan Budaya .....	66
4.2.2. Disparitas Input Pembangunan Keseluruhan Dimensi.....	69
4.3. Keterkaitan Disparitas Tingkat Hidup dengan Disparitas Input Pembangunan .....	72
<b>V. Penutup</b> .....	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Nilai Koefisien Korelasi Spearman dan Nilai Probabilita Masing-masing Variabel Terhadap Validator	36
4.2	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Kesehatan dan Gizi	39
4.3	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Pendidikan	40
4.4	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Ekonomi	41
4.5	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Ketenagakerjaan	42
4.6	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Sosial Budaya	43
4.7	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Perumahan dan Lingkungan	44
4.8	Reliabilitas Variabel Pada Dimensi Teknologi dan Informasi	45
4.9	Reliabilitas Variabel Pada Keseluruhan Dimensi	46
4.10	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik di Bidang Kesehatan dan Gizi	72
4.11	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk di Bidang Kesehatan dan Gizi	73
4.12	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik di Bidang Pendidikan	76
4.13	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk di Bidang Pendidikan	77
4.14	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik di Bidang Ekonomi	81
4.15	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk di Bidang Ekonomi	82

4.16	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik di Bidang Ketenagakerjaan	86
4.17	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk di Bidang Ketenagakerjaan	86
4.18	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik di Bidang Sosial dan Budaya	91
4.19	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk di Bidang Sosial dan Budaya	92
4.20	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik di Bidang Perumahan dan Lingkungan	95
4.21	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk di Bidang Perumahan dan Lingkungan	96
4.22	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik di Bidang Teknologi dan Informasi	101
4.23	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk di Bidang Teknologi dan Informasi	102
4.24	Rangkuman Hasil Pengolahan IDTHAP	105
4.25	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terbaik Keseluruhan Dimensi Dikaitkan Dengan Peringkat Indeks Disparitas PDRB	110
4.26	Lima Provinsi Dengan Peringkat IDTHAP Terburuk Keseluruhan Dimensi Dikaitkan Dengan Peringkat Indeks Disparitas PDRB	111
4.27	Kesenjangan Pembangunan di Yogyakarta Terhadap DKI Jakarta	113
4.28	Kesenjangan Pembangunan Kepulauan Riau Terhadap DKI Jakarta	115



# BAB I

---

## PENDAHULUAN

---

*Sub Direktorat Analisis Statistik*

<http://www.bps.go.id>



### 1.1. Latar Belakang

Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan pintu utama untuk meraih cita-cita yang lebih luhur. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, untuk meraih cita-cita luhur tersebut, bangsa Indonesia harus mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Sejak proklamasi kemerdekaan, tidak kurang dari 65 tahun Indonesia telah melaksanakan pembangunan. Selama kurun waktu tersebut pembangunan dilaksanakan melalui satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya dengan berbagai kebijakan yang hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pembangunan selama ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi tinggi ini bukan hanya sebagai sarana dalam meraih kesejahteraan, tetapi lebih dari itu para pakar menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi merupakan salah satu indikator pengukur keberhasilan pembangunan. Berpijak dari pemahaman ini, banyak negara di dunia berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, tidak terkecuali Indonesia. Selain ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi, ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara juga ditentukan dari kemampuan negara tersebut dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga kemampuan dalam menekan kesenjangan. Akhir-akhir ini beberapa ahli juga memasukkan unsur kesinambungan/keberlanjutan (tidak ada kerusakan alam) dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan.

Ditinjau dari sisi modal, Indonesia memiliki modal yang besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Modal itu baik berupa sumber daya alam, struktur demografis penduduk, sumber daya kultural, termasuk potensi dan kreativitas penduduk yang beragam. Akan tetapi besarnya modal tersebut tidaklah cukup menjamin keberhasilan pembangunan, hal yang tidak kalah penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan adalah terkait masalah pemerataan, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berkurang maknanya manakala tidak diikuti pemerataan. Sejarah telah membuktikan, perencanaan pembangunan yang cenderung

sentralistik pada masa orde baru ditengarahi lebih banyak menimbulkan kesenjangan secara regional.

Kesenjangan regional ini perlu dikurangi agar tidak membahayakan stabilitas dan integrasi nasional. Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyebar di seluruh wilayah Indonesia, utamanya pada daerah-daerah kantong kemiskinan yaitu daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kemudian, dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi ini diperlukan peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara pelaku dan sumber daya lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu dinikmati oleh masyarakat setempat. Pembangunan semacam ini akan berhasil manakala perencanaan pembangunan yang dilakukan lebih bersifat kewilayahan "desentralisasi".

Otonomi daerah yang mulai digulirkan tahun 1999 dengan berlandaskan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada dasarnya merupakan pijakan bagi perencanaan pembangunan yang bersifat kewilayahan tersebut. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, Suharto (2002) mengemukakan bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi, otonomi daerah bertujuan agar perencanaan pembangunan dikembangkan dari bawah (*bottom up planning*). Dalam pelaksanaan pembangunan, skala prioritas ditujukan pada spesialisasi regional sesuai dengan keunggulan sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah. Skala prioritas ini harus diikuti dengan kebijakan ekonomi regional dari pemerintah pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan diikuti oleh pemerataan regional, yang pada akhirnya pembangunan ekonomi tersebut akan lebih efisien dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Meskipun demikian bukan berarti pelaksanaan otonomi daerah tidak menemui hambatan, adanya perbedaan antar daerah dalam hal latar belakang demografi, geografi, infrastruktur, ekonomi, dan kapasitas sumberdaya, maka hal ini jelas memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Konsekuensi tersebut adalah keberagaman daerah dalam hal kinerja pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan (Bappenas, 2000). Senada dengan hal ini, Noegroho dan Soelistianingsih, L. (2007) juga mengemukakan bahwa meskipun masing-masing daerah mempunyai potensi dan kekayaan alam yang dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan, diantaranya kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota dalam pencapaian tingkat perekonomian.

Terkait dengan kinerja dalam pelaksanaan otonomi daerah, Daryanto (2003) mengemukakan bahwa permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian pemerintah di antaranya adalah berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antar daerah, adanya wilayah-wilayah yang tertinggal dan permasalahan kemiskinan. Selanjutnya disebutkan bahwa disparitas (kesenjangan) pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan pendapatan perkapita, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana (seperti transportasi, energi dan telekomunikasi), kesenjangan pelayanan sosial (seperti kesehatan dan pendidikan), dan kesenjangan terhadap akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah tersebut terjadi utamanya disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-pedesaan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan wilayah yang lebih memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan (Bappenas, 2006). Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada

peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar (Bappenas, 2010a).

Dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pembangunan baik secara nasional maupun kewilayahan "provinsi" maka diperlukan suatu alat ukur yang mampu memotret keberhasilan tersebut secara akurat. Sejalan dengan upaya memotret keberhasilan pembangunan terutama dari sisi kesenjangan kesejahteraan antar provinsi, BPS telah mengeluarkan indikator statistik berupa Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi yang diterbitkan pada tahun 2002 dan 2009. Dari indikator ini dapat diketahui capaian hasil pembangunan yang dilakukan masing-masing provinsi dibandingkan dengan provinsi acuan "model". Perlu diketahui bahwa indikator tersebut pada dasarnya merupakan potret kesenjangan pembangunan dari sisi output. Sementara kita tahu bagaimana pun keberhasilan suatu proses pembangunan sangat ditentukan oleh input pembangunan yang dipakai untuk mendukung keterlaksanaan dan keberhasilan pembangunan tersebut. Oleh karena itu diperlukan indikator lanjutan yang mampu memotret kesenjangan pembangunan dari sisi input. Dengan menyandingkan antara indikator output dan indikator input, maka dapat dijelaskan kesenjangan output pembangunan yang terjadi antar provinsi melalui kesenjangan input pembangunannya. Dalam rangka meningkatkan ketepatan dan keakuratan alat ukur, maka pada penelitian ini juga akan dilakukan pembaharuan "*improvement*" dari aspek metodologi yaitu menambahkan metode pembobotan pada penghitungan indeks komposit.

## 1.2. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a) Mengkaji dimensi dan variabel pengukur input pembangunan.
- b) Menguji validitas dan reliabilitas variabel input pembangunan.
- c) Menentukan metode pembobotan dalam penghitungan indeks komposit.
- d) Menyusun indeks komposit disparitas input pembangunan.

- e) Mengkaji dan menelaah hasil indeks disparitas input pembangunan, dikaitkan dengan indeks disparitas output pembangunan.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dilakukan pada level provinsi, sehingga akan diperoleh Indeks Disparitas Input Pembangunan (IDIP) antar provinsi. Dalam tulisan ini, provinsi yang akan dijadikan sebagai provinsi acuan, ditentukan berdasarkan analisis perbandingan secara deskriptif untuk tiap-tiap variabel pengukur. Nilai maksimum dari tiap-tiap variabel pengukur selanjutnya dialokasikan dalam satu tempat sebagai nilai provinsi ideal, yang akan dijadikan sebagai provinsi acuan.

Seperti halnya Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi, salah satu keterbatasan dalam Analisis Disparitas Input Pembangunan adalah ada beberapa variabel pengukur yang menggunakan tahun data yang berbeda, tetapi untuk setiap variabel pengukur yang sama pada provinsi berbeda digunakan tahun data yang sama. Secara umum IDIP disusun menggunakan data tahun 2009, sehingga hasil dan keadaan yang digambarkan mendekati keadaan tahun 2009.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Publikasi ini terdiri dari 5 bab. Bab I membahas latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab II membahas tentang tinjauan pustaka, yang secara spesifik mengupas konsep, tujuan, dan input pembangunan, termasuk juga dibahas tentang konsep disparitas. Bab III membahas tentang metodologi penelitian, antara lain dijelaskan mengenai pemilihan dimensi dan variabel pengukur, metode seleksi variabel, metode penghitungan indeks komposit, dan metode analisis. Bab IV menjabarkan hasil pengolahan dan temuan-temuan analisis, antara lain dijelaskan IDIP dari berbagai aspek dimensi input pembangunan. Bab V sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

# BAB II

---

## TINJAUAN PUSTAKA

---

*Sub Direktorat Analisis Statistik*





## 2.1. Pembangunan

### 2.1.1. Konsep Pembangunan

Menurut Todaro (1977), pembangunan diartikan sebagai “*the process of improving the quality of all human lives*”, sehingga pembangunan harus mempunyai tujuan mempertinggi tingkat penghidupan bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, Suharyanto (2006) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus ke arah yang dikehendaki, yaitu perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik merupakan ciri suatu pembangunan, ini mengingat tidak semua perubahan dapat disebut pembangunan, terutama perubahan dari kondisi tertentu ke kondisi tidak baik atau negatif.

Masyarakat pada dasarnya merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pada intinya difokuskan untuk perbaikan kehidupan masyarakat. Berpijak pada pemikiran ini maka muncul konsep pembangunan masyarakat. Menurut PBB, pembangunan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang dilakukan melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Sumberdaya alam mempunyai peranan penting bagi pelaksanaan pembangunan. Peran penting ini baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang, sehingga dalam penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992, disepakati bahwa prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia. Kemudian KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 juga

membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup. Kemerosotan kualitas lingkungan hidup ini sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia perlu melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan mengandung dua unsur yaitu kebutuhan dan keterbatasan. Kebutuhan di sini khususnya berkaitan dengan kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara. Sementara itu, keterbatasan berkaitan dengan penguasaan teknologi dan organisasi sosial yang harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan (Sudarmaji, 2007).

Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara tiga pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi (Bappenas, 2010b).

### 2.1.2. Tujuan Pembangunan

Dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal (Bappenas, 2010a).

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maka disusun suatu perencanaan pembangunan nasional yang implementasinya dilaksanakan melalui suatu tahapan pembangunan. Pada era orde baru kita mengenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 25 tahun, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Kemudian setelah Otonomi Daerah, dengan ditiadaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun. Penyusunan RPJPN ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dengan paradigma perencanaan yang visioner dan memuat arahan secara garis besar. Dalam pelaksanaannya, RPJPN juga dijabarkan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk kurun waktu 5 tahun. Masing-masing tahap tersebut mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Keseluruhan tahapan pembangunan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Sejalan dengan usaha meraih dan meningkatkan kesejahteraan, maka melalui RPJPN 2005-2025 ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan adalah

mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realisasi dari usaha tersebut, pada RPJM tahap pertama (2005-2009) ditetapkan skala prioritas utama dan strategi pelaksanaan pembangunan yang diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Kemudian usaha tersebut dilanjutkan pada RPJM tahap kedua (2010-2014), dengan skala prioritas utama dan strategi ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian (Bappenas, 2010a).

### **2.1.3. Pembangunan Kewilayahan**

Pada satu dasawarsa terakhir, pemikiran pembangunan secara konseptual telah mengalami perubahan paradigma yang lebih mendasar dari pola sentralistik ke pola desentralisasi dengan kebijakan otonomi daerah. Konsep otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No.22 tahun 1999 memberikan kewenangan pemerintahan daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah memberikan implikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah. Otonomi daerah mengisyaratkan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dibandingkan pendekatan sektoral (Ary Suharyanto, ...).

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kewilayahan maka salah satu misi dalam RPJPN 2005-2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai misi tersebut maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan adalah:

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Selanjutnya disebutkan bahwa strategi pengembangan wilayah tersebut dilaksanakan dalam kerangka sinergi pusat-daerah dan antar daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif, serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia (Bappenas, 2010a).

#### 2.1.4. Input Pembangunan

Dalam suatu proses produksi, untuk dapat menghasilkan suatu keluaran "output" maka diperlukan suatu masukan "input". Demikian halnya dengan pembangunan, untuk menghasilkan setiap output pembangunan sudah barang tentu juga diperlukan suatu input pembangunan. Pada penelitian ini, input pembangunan diartikan sebagai suatu masukan berupa sumber kekuatan baik fisik maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan untuk mendukung keseluruhan proses pembangunan. Input pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan suatu faktor produksi berupa modal pembangunan yang komponennya meliputi sumber daya alam, manusia, teknologi, informasi, infrastruktur, energi, dan lain-lain.

Modal pembangunan bangsa secara umum dibedakan menurut dua bentuk modal, yaitu modal ekonomi (*economic capitals*) dan modal sosial (*social capitals*). Modal ekonomi merupakan kelengkapan tatanan ekonomi yang terdiri dari sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (Infrastruktur), dan modal keuangan (tabungan pemerintah). Sementara itu, modal sosial merupakan kelengkapan tatanan sosial yaitu terdiri atas sumber daya manusia (SDM), modal kelembagaan, modal pengetahuan, dan modal budaya. Selanjutnya dikemukakan bahwa sumber daya alam dapat berupa luas wilayah, lahan hutan, flora fauna, iklim, sungai dan danau, dan lain-lain. Sumber daya buatan manusia dapat berupa bangunan, monumen, karya seni, peralatan hidup, dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber daya manusia meliputi penduduk, organisasi sosial, pandangan hidup, kebiasaan dan sikap, identitas, dan lain-lain (<http://www.forumbudaya.org/index.php>).

Dalam kaitannya dengan modal pembangunan, Bappenas (2010a) menyebutkan bahwa kepemilikan Indonesia akan modal pembangunan yang besar dapat dilihat dari kepemilikan sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Potensi geografi yang strategis yang ditopang

oleh sumber daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Selanjutnya disebutkan bahwa di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Kemudian ketersediaan lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian juga merupakan modal yang tidak kalah penting. Di bidang kependudukan, Indonesia memiliki potensi tinggi di berbagai bidang kependudukan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas.

Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi (Priyono, 2000).

## **2.2. Kesejahteraan**

### **2.2.1. Konsep Kesejahteraan**

Menurut *World Bank Institute* dan BPS (2002), ada banyak definisi dan konsep yang berbeda tentang kesejahteraan atau “*well-being*”. Misalnya, kita dapat mengatakan kesejahteraan seseorang sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan komoditas secara umum, seseorang dikatakan mampu (memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik) jika dia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam



menggunakan sumber daya yang dimilikinya (kekayaan). Atau kita dapat berpikir tentang kemampuan untuk memperoleh jenis barang-barang konsumsi tertentu (misalnya makanan dan perumahan). Seseorang yang kurang mampu untuk andil (berfungsi) dalam masyarakat mungkin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (Sen, 1987) atau lebih rentan (*vulnerable*) terhadap krisis/gejolak ekonomi dan cuaca.

Konsep lain dari kesejahteraan, baik diukur dari dimensi moneter maupun non moneter adalah ketimpangan. Ketimpangan menitikberatkan pada distribusi dari atribut/variabel terukur (misalnya pendapatan atau pengeluaran) terhadap seluruh penduduk. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa posisi relatif dari individu rumah tangga dalam masyarakat merupakan aspek penting dari kesejahteraan mereka. Tingkat ketimpangan secara keseluruhan dalam suatu negara, wilayah atau kelompok penduduk, baik dalam bentuk dimensi moneter maupun non moneter juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan secara ringkas tentang tingkat kesejahteraan dalam kelompok tersebut.

Hal lain tentang kesejahteraan adalah kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan didefinisikan sebagai peluang atau resiko menjadi miskin atau jatuh menjadi lebih miskin pada waktu-waktu mendatang. Kerentanan merupakan dimensi kunci dari kesejahteraan karena kerentanan berakibat pada perilaku individu (dalam bentuk investasi, pola produksi, strategi penanggulangan) dan persepsi dari kondisi mereka sendiri.

Menurut Bank Dunia (World Bank, 2000), "*poverty is pronounced deprivation in well being*", dimana kesejahteraan dapat diukur oleh kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, aset, perumahan dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan berbicara.

### 2.2.2. Kesejahteraan Rakyat

Salah satu visi Indonesia 2014 diantaranya adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, yang dimaksud dengan keadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia (Bappenas, 2010a).

Pada periode 2004-2009, agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh dengan lima sasaran pokok (Anonim, 2005), yaitu:

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
3. Meningkatkan kualitas manusia yang tercermin dari angka IPM;
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Membaiknya infrastruktur sarana penunjang pembangunan.

Hasil dari pelaksanaan pembangunan pada periode 2004-2009 tersebut telah meletakkan fondasi/landasan dalam berbagai bidang perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat miskin. Landasan kebijakan tersebut antara lain (Bappenas, 2010a) :

1. Penyusunan data dasar (dengan nama dan alamat) rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang sangat penting untuk mengarahkan program perlindungan dan bantuan sosial;
2. Pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan untuk mempermudah dan memperjelas koordinasi;
3. Harmonisasi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri;

4. Regulasi yang mengatur koordinasi penanggulangan kemiskinan dari pusat sampai ke daerah, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya secara bersama.

Kemudian pada periode 2010-2014 pelaksanaan pembangunan akan tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Pada periode 2010-2014, usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh dengan melaksanakan beberapa sasaran pokok, antara lain :

1. Melanjutkan kebijakan makro ekonomi yang terukur dan berhati hati
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
4. Terciptanya kemandirian dalam bidang pangan
5. Membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energy
6. Perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7. Meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan.

## 2.3. Disparitas

### 2.2.1. Konsep Disparitas

Disparitas berasal dari kata “dis” yang berarti tidak dan “paritas” yang berarti keseimbangan, kesamaan atau kesetaraan; sehingga disparitas dimaknai dengan istilah ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, perbedaan (nilai, rasio, peringkat, usia, status, dan lain-lain). Selain itu, disparitas juga dimaknai dengan istilah kesenjangan dan ketimpangan (<http://dictionary.reference.com/browse/disparity>).

Dalam dunia kesehatan, dikenal istilah kesenjangan kesehatan atau disebut juga dengan ketidaksetaraan atau ketimpangan kesehatan di beberapa negara yang merujuk pada perbedaan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan di seluruh ras, etnis, orientasi seksual dan sosial ekonomi suatu kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, dikenal kesenjangan pendapatan gender yang mengacu pada perbedaan upah laki-laki dan perempuan; ketimpangan ekonomi (perbedaan kekayaan dan pendapatan) yang mengacu pada kesenjangan dalam distribusi ekonomi aset dan penghasilan; dan ketimpangan pendapatan metrik atau distribusi pendapatan metrik yang oleh para ilmuwan sosial digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi. Sementara itu dalam bidang sosial, dikenal ketimpangan sosial yang mengacu pada situasi di mana individu dalam masyarakat tidak memiliki status sosial yang sama dikaitkan dengan hak milik, akses ke pendidikan, perawatan kesehatan dan barang sosial lainnya (<http://en.wikipedia.org/wiki/disparity>).

Sementara itu dalam kaitannya dengan kesenjangan kesejahteraan, Bappenas (2006) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap konsepsi kesejahteraan menuntut tidak hanya representasi intensitas agregat tetapi juga representasi distribusional kesejahteraan antar kelompok masyarakat atau antar daerah. Kesenjangan tidak lain adalah suatu representasi distribusional tersebut. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa kesenjangan

secara konsep mempunyai kemiripan dengan konsep tentang perbedaan. Terkait masalah kesejahteraan, kesenjangan menghendaki pendefinisian kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok yang sejak awal sering digunakan adalah kelompok pendapatan. Selain pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan, pengukuran kesenjangan juga menggunakan daerah sebagai basis pengelompokan. Pengelompokan berbasis daerah tersebut mempunyai implikasi pengamatan kesenjangan masyarakat antar daerah. Pengelompokan lain yang biasa digunakan adalah kelompok masyarakat wilayah desa dan masyarakat wilayah kota. Selain itu, juga berkembang perhatian terhadap pengukuran kesenjangan berbasis gender.

Penelitian tentang kesenjangan "disparitas" khususnya kesenjangan antar wilayah telah dilakukan oleh Williamson tahun 1966. Dalam penelitian tersebut Williamson meneliti kesenjangan antar wilayah ditinjau dari pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah (Bappenas, 2006). Selain itu, penelitian tentang kesenjangan antar wilayah "regional" juga dilakukan oleh Higgins tahun 1973. Dalam penelitian tersebut Higgins menganalisis disparitas regional dengan menggunakan pendekatan *Trade-off Curves* dan menyimpulkan bahwa di daerah-daerah maju terjadi masalah *trade of* antara inflasi dan pengangguran, sedangkan di daerah-daerah terbelakang menghadapi kedua masalah tersebut secara simultan. Disparitas permasalahan ini tidak saja terjadi secara regional tetapi juga sektoral. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa di daerah maju aktivitas ekonomi terkonsentrasi pada sektor-sektor modern, sedangkan di daerah yang miskin terkonsentrasi pada sektor tradisional (Suharto, ...).

Kemudian dalam kaitannya dengan masalah desentralisasi, Christian Lessmann tahun 2006 mengemukakan bahwa negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang rendah. Kewenangan dan otonomi lokal terhadap kapasitas fiskal wilayah yang besarakan dapat mengurangi

kesenjangan. Namun, hasil temuan ini hanya berlaku bagi negara-negara maju saja. Bagi negara berkembang dan miskin, desentralisasi mungkin akan menyebabkan semakin tajamnya kesenjangan antar wilayah. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat korupsi dan lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik (Bappenas, 2006).

### **2.2.2. Disparitas Antar Wilayah**

Kesenjangan antar wilayah merupakan salah satu isu penting yang banyak diperbincangkan berbagai kalangan seiring dengan pembangunan kewilayahan, bahkan salah satu sasaran pokok dalam RPJMN 2005-2009 guna mendukung pelaksanaan pembangunan kewilayahan adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah tersebut, maka ditetapkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

#### **1. Pembangunan Perdesaan**

Pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan; meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya; memperluas akses masyarakat perdesaan ke sumber daya sumber daya produktif; pelayanan publik dan pasar; meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan serta meminimalkan resiko kerentanan; serta mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

#### **2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dilakukan dengan: (i). mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, (ii) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil, (iii) mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah

arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, (iv) menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara hirarkis, dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional, (v) meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan; (vi) mengoperasionalkan 'Rencana Tata Ruang' sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-Provinsi, RTRW-Kabupaten/kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

Berkurangnya kesenjangan antar wilayah tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah (Bappenas, 2005a).

Sementara itu dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Jawa-Bali akan terus dilakukan. Dalam kaitannya kesenjangan antar wilayah, usaha mengurangi kesenjangan antar wilayah tersebut akan ditempuh dengan meningkatkan produksi, investasi, dan perdagangan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan di luar Jawa-Bali. Kebijakan ini juga diharapkan akan mempercepat pemerataan antar wilayah. Salah satu implikasi dari percepatan pengembangan wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua adalah

pergeseran alokasi investasi pemerintah ke wilayah tersebut. Sementara, pembangunan wilayah Jawa-Bali didukung oleh kerjasama investasi pemerintah dan swasta dan juga investasi swasta penuh (Bappenas, 2010c).

<http://www.bps.go.id>



<http://www.bps.go.id>

# BAB III

---

## METODOLOGI PENELITIAN

---

*Sub Direktorat Analisis Statistik*



### 3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini utamanya merupakan data hasil survei/sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu juga digunakan data-data sekunder yang berasal dari beberapa instansi/institusi terkait diantaranya Bank Indonesia (BI), Kementerian Pendidikan Nasional, dan Instansi/Institusi terkait lainnya. Data dimaksud antara lain meliputi data :Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Statistik Indonesia.

### 3.2. Kerangka Pikir Penelitian

Analisis Disparitas Input Pembangunan dibangun menggunakan lima dimensi, di mana masing-masing dimensi terdiri dari beberapa variabel/indikator pengukur. Adapun lima dimensi yang digunakan untuk mengukur Disparitas Input Pembangunan adalah : Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Perekonomian, Sumber Daya Manusia, serta dimensi Kelembagaan dan Budaya. Sementara itu, variabel/indikator pengukur pada masing-masing dimensi berdasarkan kajian literatur dan ketersediaan data adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dimensi Sumber Daya Alam (X) mencakup variabel:
  - a. Luas wilayah per kapita ( $x_{101}$ )
  - b. Luas Lahan Sawah per kapita ( $x_{102}$ )
  - c. Luas areal tanaman perkebunan per kapita ( $x_{103}$ )
  - d. Luas kawasan hutan per kapita ( $x_{104}$ )
  - e. Persentase desa yang mengalami bencana tanah longsor dalam 3 tahun terakhir ( $x_{105}$ )
  - f. Persentase desa yang mengalami bencana banjir dalam 3 tahun terakhir ( $x_{106}$ )

- g. Persentase desa yang mengalami bencana gempa bumi dalam 3 tahun terakhir ( $x_{107}$ )
  - h. Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran air ( $x_{108}$ )
  - i. Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran tanah ( $x_{109}$ )
  - j. Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran udara ( $x_{110}$ )
  - k. Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran suara/bising ( $x_{111}$ )
2. Variabel Dimensi Infrastruktur (Y), terdiri dari variabel :
- a. Jumlah RS per kabupaten ( $x_{201}$ )
  - b. Jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan ( $x_{202}$ )
  - c. Jumlah puskesmas/puskesmas pembantu per kecamatan ( $x_{203}$ )
  - d. Jumlah Bank umum per kabupaten ( $x_{204}$ )
  - e. Persentase desa menurut ketersediaan mini market ( $x_{205}$ )
  - f. Persentase desa menurut ketersediaan restoran/ rumah makan ( $x_{206}$ )
  - g. Persentase desa menurut ketersediaan hotel ( $x_{207}$ )
  - h. Persentase desa menurut ketersediaan kelompok pertokoan ( $x_{208}$ )
  - i. Persentase desa menurut ketersediaan pasar dengan bangunan permanen ( $x_{209}$ )
  - j. Persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian ( $x_{210}$ )
  - k. Persentase desa menurut ketersediaan wartel ( $x_{211}$ )
  - l. Persentase desa menurut ketersediaan warnet ( $x_{212}$ )
  - m. Persentase desa menurut ketersediaan kantor pos/ kantor pos pembantu ( $x_{213}$ )
  - n. Persentase desa menurut ketersediaan pos keliling ( $x_{214}$ )
  - o. Persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat ( $x_{215}$ )
  - p. Jumlah kendaraan bermotor per kapita ( $x_{216}$ )

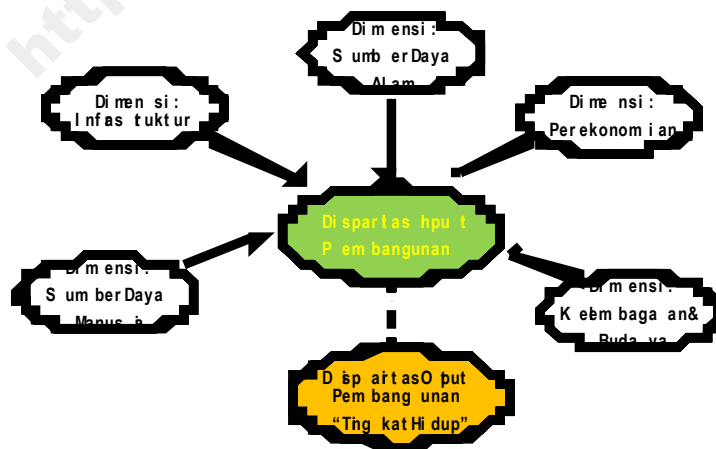
- q. Persentase desa/kelurahan yang jenis permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/diperkeras ( $x_{217}$ )
  - r. Persentase desa yang ketersediaan jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun ( $x_{218}$ )
  - s. Persentase desa yang dilalui sungai untuk transportasi ( $x_{219}$ )
  - t. Jumlah SD/ sederajat per desa ( $x_{220}$ )
  - u. Jumlah SMP/ sederajat per kecamatan ( $x_{221}$ )
  - v. Jumlah SMA/ sederajat per kabupaten ( $x_{222}$ )
  - w. Jumlah Perguruan Tinggi ( $x_{223}$ )
  - x. Persentase desa yang tersedia lapangan sepak bola ( $x_{224}$ )
  - y. Persentase desa yang tersedia lapangan bola voli ( $x_{225}$ )
  - z. Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis ( $x_{226}$ )
  - aa. Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskop ( $x_{227}$ )
3. Variabel Dimensi Perekonomian (Z), terdiri dari variabel :
- a. PDRB nominal per kapita ( $x_{301}$ )
  - b. Total investasi per kabupaten ( $x_{302}$ )
  - c. Total kredit perbankan per kabupaten ( $x_{303}$ )
  - d. Total nilai ekspor daerah per kabupaten ( $x_{304}$ )
  - e. Persentase desa menurut ketersediaan Kredit Ketahanan Pangan "KKP" ( $x_{305}$ )
  - f. Persentase desa menurut ketersediaan Kredit Usaha Kecil "KUK" ( $x_{306}$ )
  - g. Persentase desa menurut ketersediaan Kredit Pemilikan Rumah "KPR" ( $x_{307}$ )
  - h. Persentase desa menurut ketersediaan kredit Lainnya ( $x_{308}$ )
  - i. Persentase desa menurut ketersediaan Koperasi Unit Desa ( $x_{309}$ )
  - j. Persentase desa menurut ketersediaan Koperasi Industri Kecil & Kerajinan Rakyat ( $x_{310}$ )
  - k. Persentase desa menurut ketersediaan Koperasi Simpan Pinjam ( $x_{311}$ )
  - l. Persentase desa menurut ketersediaan Koperasi Non KUD ( $x_{312}$ )

4. Variabel Dimensi Sumber Daya Manusia (U), terdiri dari variabel :
- a. Jumlah penduduk per desa ( $x_{401}$ )
  - b. Persentase penduduk usia kerja " 15 tahun ke atas" ( $x_{402}$ )
  - c. Persentase angkatan kerja ( $x_{403}$ )
  - d. Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki kurang dari SMA/ kejuruan ( $x_{404}$ )
  - e. Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki SMA/kejuruan ( $x_{405}$ )
  - f. Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki terendah Diploma I ( $x_{406}$ )
  - g. Persentase penduduk bekerja di sektor pertanian ( $x_{407}$ )
  - h. Persentase penduduk bekerja di sektor manufaktur ( $x_{408}$ )
  - i. Persentase penduduk bekerja di sektor jasa ( $x_{409}$ )
  - j. Persentase penduduk miskin ( $x_{410}$ )
  - k. Jumlah dokter per desa ( $x_{411}$ )
  - l. Jumlah tenaga medis selain dokter per desa ( $x_{412}$ )
  - m. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG ( $x_{413}$ )
  - n. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi DPT ( $x_{414}$ )
  - o. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Polio ( $x_{415}$ )
  - p. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Campak/Morbili ( $x_{416}$ )
  - q. Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Hepatitis B ( $x_{417}$ )
  - r. Rasio murid guru SD/ sederajat ( $x_{418}$ )
  - s. Rasio murid guru SMP/ sederajat ( $x_{419}$ )
  - t. Rasio murid guru SMA/ sederajat ( $x_{420}$ )
  - u. Rasio mahasiswa dosen ( $x_{421}$ )
5. Variabel Dimensi Budaya (V), terdiri dari variabel :
- a. Persentase desa menurut keberadaan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat "LSM" ( $x_{501}$ )
  - b. Persentase desa menurut keberadaan kegiatan yayasan/kelompok/persatuan kematian ( $x_{502}$ )
  - c. Persentase desa yang dapat menerima program TVRI ( $x_{503}$ )

- d. Persentase desa yang dapat menerima program TV swasta nasional ( $X_{504}$ )
- e. Persentase desa yang dapat menerima program TV lokal ( $X_{505}$ )
- f. Persentase desa yang mengalami kejadian perkelahian massal ( $X_{506}$ )
- g. Persentase desa yang mengalami tindak kejahatan pencurian ( $X_{507}$ )
- h. Persentase desa yang mengalami tindak kejahatan narkoba ( $X_{508}$ )
- i. Persentase desa yang mempunyai ketersediaan tempat penampungan sampah sementara ( $X_{509}$ )

Kemudian sebelum variabel/indikator pengukur tersebut digunakan untuk menentukan disparitas input pembangunan, terlebih dahulu akan dilakukan seleksi variabel melalui suatu uji validitas, uji reliabilitas, dan seleksi variabel normatif. Selanjutnya disparitas input pembangunan ini akan disandingkan dengan disparitas output pembangunan “disparitas tingkat hidup”. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**KERANGKA PIKIR PENELITIAN**





### 3.3. Seleksi Variabel Pengukur

#### 3.3.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel/indikator yang digunakan sebagai pengukur input pembangunan secara statistik dapat diandalkan kevalidannya. Validitas variabel pada dasarnya menggambarkan keeratan hubungan antara suatu variabel “variabel kandidat” dengan validator. Dalam kaitannya dengan uji validitas ini, validator dipilih dari salah satu variabel kandidat yang dipandang paling tepat untuk mengukur input pembangunan, variabel dimaksud adalah jumlah penduduk. Dipilihnya jumlah penduduk sebagai validator didasarkan pada suatu alasan bahwa penduduk selain sebagai subjek juga sebagai objek pembangunan tersebut, yang keberadaannya sangat menentukan pelaksanaan suatu pembangunan. Namun agar jumlah penduduk tersebut terbanding antar wilayah “provinsi” maka jumlah penduduk tersebut sebaiknya diboboti dengan banyaknya wilayah administrasi terkecil “desa” yang ada pada masing-masing provinsi. Pembobotan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa input yang ada di suatu provinsi pada dasarnya merupakan akumulasi input dari seluruh desa di provinsi tersebut, sehingga jika jumlah penduduk per desa suatu provinsi tinggi maka dapat dikatakan bahwa input pembangunan di provinsi tersebut juga tinggi. Dari uraian ini maka validator pada analisis ini adalah jumlah penduduk per desa.

Selanjutnya untuk menguji validitas maka dihitung koefisien korelasi antara variabel kandidat dengan validator, yaitu dengan menggunakan “*Spearman rank correlation coefficient*” dengan rumus :

$$r = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

di mana :

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

$n$  = jumlah sampel

$d_i$  = selisih nilai (rank) antara dua variabel

Secara empiris validitas (kesahihan) dari variabel/indikator pengukur dapat dilihat dari nilai signifikansi (p-value) koefisien korelasi spearman antara setiap variabel kandidat dengan validator. Suatu variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi dari koefisien korelasi spearman < 0,05; yang berarti bahwa keeratan hubungan variabel tersebut dengan validator adalah nyata "signifikan".

### 3.3.2. Uji Reliabilitas

Selain valid untuk mengukur disparitas, beberapa variabel terpilih diharapkan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap reliabilitas ukuran baik secara bersama-sama maupun sendiri. Ukuran ideal yang dicari adalah ukuran yang reliabilitasnya tinggi, melibatkan sedikit variabel dan tiap-tiap variabel memiliki kontribusi yang signifikan terhadap reliabilitas ukuran. Upaya peningkatan reliabilitas ukuran biasanya ditempuh dengan mengeluarkan variabel yang kontribusinya rendah terhadap reliabilitas ukuran. Tingkat reliabilitas suatu ukuran menggambarkan keeratan hubungan diantara masing-masing variabel yang valid. Tingkat reliabilitas suatu ukuran yang melibatkan  $k$  variabel dihitung dengan menggunakan rumus Cronbach's alpha (Carmines dan Zeller, 1981) yaitu :

$$r_{kk} = \frac{k\bar{r}_{ij}}{[1 + (k - 1)\bar{r}_{ij}]}$$

di mana :

$\bar{r}_{ij}$  = rata-rata koefisien korelasi dari semua elemen ( $i \neq j$ ) dalam matriks korelasi

$$= \frac{1}{(k - 1)(k - 1)} \sum_{i \neq j}^{k-1} \sum |r_{ij}|$$

Semakin tinggi nilai  $r_{kk}$  semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu ukuran. Tanda  $||$  dari  $r_{ij}$  diperlukan mengingat dalam prakteknya nilai  $r_{ij}$  untuk ( $i \neq j$ ) dapat bernilai positif dan negatif, sehingga jika banyaknya komponen yang negatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah komponen yang positif hal ini dapat menyebabkan nilai  $\bar{r}_{ij}$  bernilai negatif, akibatnya tingkat reliabilitas ukuran " $r_{kk}$ " menjadi negatif. Oleh karena itu, untuk menghindari hal ini  $\bar{r}_{ij}$  dihitung dengan mengambil nilai absolut dari  $r_{ij}$ .

Selain memiliki tingkat reliabilitas ukuran yang tinggi secara bersama-sama, setiap variabel yang digunakan diharapkan juga mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap reliabilitas ukuran. Besarnya kontribusi suatu variabel dilihat dari besarnya nilai koefisien masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut.

$$\bar{r}_i = \frac{1}{k - 1} \sum_{i \neq j}^{k-1} |r_{ij}|$$

di mana :

k = banyaknya variabel yang digunakan.

$r_{ij}$  = koefisien korelasi antara variabel ke-i dengan variabel ke-j yang diperoleh dari matriks korelasi.

Suatu variabel mempunyai kontribusi reliabilitas yang tinggi jika :

$$\bar{r}_i > \bar{r}_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$$

di mana :

$\sigma_{r_{ij}}$  = standar deviasi dari  $r_{ij}$

### 3.3.3. Seleksi Variabel Normatif

Seleksi variabel normatif ini bertujuan untuk menyeleksi variabel yang tidak lolos uji validitas dan reliabilitas tetapi secara normatif sangat diyakini sebagai indikator pengukur disparitas input pembangunan. Jika terjadi hal demikian maka variabel normatif tersebut tetap dipertahankan sebagai salah satu indikator pengukur disparitas input pembangunan.

### 3.4. Metode Penghitungan Indeks Komposit

Analisis Disparitas Input Pembangunan dibangun dengan menggunakan pendekatan metode taksonomik (*taxonomic method*) yang banyak dipakai untuk membuat peringkat sekelompok negara, daerah atau unit spasial berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang berkaitan dengan berbagai ragam kondisi sosial ekonomi masing-masing negara, daerah atau unit spasial tersebut. Metode ini awalnya dikemukakan oleh ahli-ahli matematika Polandia dibawah pimpinan Florek pada tahun 1952, kemudian pada tahun 1967 oleh Hellwig metode tersebut diusulkan kepada UNESCO untuk membuat suatu perbandingan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial berbagai negara di dunia. Selanjutnya tahun 1970 metode ini digunakan oleh Harbison, Maruhnik, dan Resnik untuk membuat suatu studi pembangunan berbagai negara (Sritua, 1970).

Metode taksonomik pada dasarnya bertujuan untuk menentukan suatu indeks komposit/menyeluruh (*composite index*) dari berbagai ragam ukuran, yang selanjutnya berdasarkan indeks komposit tersebut dibuat peringkat unit spasial. Indeks komposit disparitas terdiri dari dua komponen :1). pola pembangunan (*pattern of development*) dan 2). ukuran pembangunan (*measure of development*), kemudian dari ukuran pembangunan tersebut dibuat peringkat unit spasial. Dalam kaitannya dengan analisis disparitas input pembangunan, penghitungan indeks komposit didasarkan atas beberapa variabel yang telah lolos uji validitas maupun uji reliabilitas.

Prosedur penghitungan indeks komposit dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. Susun matriks dasar "matriks A", di mana baris menunjukkan provinsi sedangkan kolom menunjukkan dimensi dan variabel/indikator yang lolos uji validitas dan reliabilitas. Misal matriks dasar tersebut dinyatakan dengan :

$$A = \begin{bmatrix} x_{111} & x_{121} \dots x_{1k_11} & \cdot & \cdot & \cdot & x_{511} & x_{521} \dots x_{5k_51} \\ x_{112} & x_{122} \dots x_{1k_12} & \cdot & \cdot & \cdot & x_{512} & x_{522} \dots x_{5k_52} \\ & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \cdot \\ x_{11n} & x_{12n} \dots x_{1k_1n} & \cdot & \cdot & \cdot & x_{51n} & x_{52n} \dots x_{5k_5n} \end{bmatrix}$$

di mana :

n = jumlah provinsi

$\sum_{i=1}^5 k_i = m$  "jumlah variabel/indikator input pembangunan"

i = menyatakan dimensi ke-i

2. Buat matrik *rescaling*, yaitu suatu matriks yang setiap elemennya diperoleh dari matriks dasar yang telah dilakukan penyekalaan ulang (*rescaling*) data awal ke dalam skala 1-10. *Rescaling* ini diperlukan karena masing-masing variabel/indikator ditengarai mempunyai pola hubungan yang tidak sama "positif dan negatif" dengan input pembangunan, sehingga agar setiap variabel dapat mengukur suatu yang sama maka perlu diseragamkan pola hubungannya. Ketentuan yang digunakan untuk *rescaling* data awal adalah :

- a. Untuk variabel yang ditengarai mempunyai hubungan positif dengan input pembangunan, dalam arti setiap kenaikan nilainya menunjukkan peningkatan input pembangunan maka rumus *rescaling* yang digunakan adalah :

$$y_{ijl} = 9 \left( \frac{x_{ijl} - x_{ij(\min)}}{x_{ij(\max)} - x_{ij(\min)}} \right) + 1$$

- b. Sedangkan untuk variabel yang ditengarai mempunyai pola hubungan negatif dengan input pembangunan atau dengan kata lain setiap kenaikan nilainya menunjukkan penurunan input pembangunan, maka digunakan rumus *rescaling* :

$$y_{ijl} = -9 \left( \frac{x_{ijl} - x_{ij(\min)}}{x_{ij(\max)} - x_{ij(\min)}} \right) + 10$$

di mana :

$i$  menyatakan dimensi ke- $i$  ( $i = 1, 2, \dots, 5$ )

$j$  menyatakan variabel/indikator ke- $j$  ( $j = 1, 2, \dots, k_i$ ;  $k_i =$  banyaknya indikator pada dimensi ke- $i$ )

$l$  menyatakan provinsi ke- $l$  ( $l = 1, 2, \dots, n$ ).

Bentuk dari matriks *rescaling* dapat dinyatakan dengan :

$$A_y = \begin{bmatrix} y_{111} & y_{121} \cdots y_{1k_1} & \cdot & \cdot & \cdot & y_{511} & y_{521} \cdots y_{5k_5} \\ y_{112} & y_{122} \cdots y_{1k_2} & \cdot & \cdot & \cdot & y_{512} & y_{522} \cdots y_{5k_5} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ y_{11n} & y_{12n} \cdots y_{1k_n} & \cdot & \cdot & \cdot & y_{51n} & y_{52n} \cdots y_{5k_5n} \end{bmatrix}$$

3. Buat matriks standardisasi yaitu suatu matriks yang elemen-elemennya didapat dari matriks *rescaling* yang telah distandarisasi “normalisasi”. Standarisasi ini diperlukan mengingat meskipun setiap variabel/indikator awal telah dilakukan *rescaling* akan tetapi tiap variabel hasil *rescaling* tersebut belum memiliki tingkat homogenitas yang sama “tidak seragam”, sehingga agar setiap variabel dapat diperbandingkan “*comparable*” maka perlu diseragamkan (*standardization data*). Rumus yang digunakan untuk menstandarisasi semua isian sel matriks dasar tersebut adalah :

$$z_{ijl} = \frac{y_{ijl} - \bar{y}_{ij}}{s_{y_{ij}}}$$

di mana :

$$\bar{y}_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n y_{ijl}$$

$$s_{y_{ij}} = \sqrt{\sum_{l=1}^n (y_{ijl} - \bar{y}_{ij})^2 / (n - 1)}$$

Sehingga diperoleh matriks yang sudah distandarisasi sebagai berikut :

$$A_Z = \begin{bmatrix} z_{111} & z_{121} & \dots & z_{1k_11} & \cdot & \cdot & \cdot & z_{511} & z_{521} & \dots & z_{5k_51} \\ z_{112} & z_{122} & \dots & z_{1k_12} & \cdot & \cdot & \cdot & z_{512} & z_{522} & \dots & z_{5k_52} \\ & \cdot & & \cdot & \cdot & \cdot & & & & & \cdot \\ & \cdot & & \cdot & \cdot & \cdot & & & & & \cdot \\ z_{11n} & z_{12n} & \dots & z_{1k_1n} & \cdot & \cdot & \cdot & z_{51n} & z_{52n} & \dots & z_{5k_5n} \end{bmatrix}$$

4. Susun matriks jarak yaitu matriks yang isian sel-selnya merupakan jarak antara provinsi ke-i (i = 1, 2, 3, ..., n) dengan acuan “nilai ideal dari masing-masing variabel/indikator”. Oleh

karena setiap variabel sudah mempunyai pola hubungan yang positif dan setiap variabel juga belum memiliki nilai yang ideal, maka dalam hal ini nilai ideal didekati dengan nilai maksimum dari masing-masing variabel/indikator tersebut. Rumus jarak antara provinsi ke- $i$  dengan nilai ideal dari masing-masing variabel/indikator adalah :

$$d_{ijl} = |z_{ijl} - z_{ijo}|$$

di mana :

$z_{ijo}$  = merupakan nilai ideal variabel/indikator ke- $j$  pada dimensi ke- $i$ .

Bentuk matriks jarak tersebut dapat dinyatakan dengan :

$$\begin{bmatrix} d_{111} & d_{121} \dots d_{1k_1 1} & \dots & d_{511} & d_{521} \dots d_{5k_5 1} \\ d_{112} & d_{122} \dots d_{1k_1 2} & \dots & d_{512} & d_{522} \dots d_{5k_5 2} \\ & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{11n} & d_{12n} \dots d_{1k_1 n} & \dots & d_{51n} & d_{52n} \dots d_{5k_5 n} \end{bmatrix}$$

5. Pada masing-masing dimensi, hitung nilai pola pembangunan “*pattern of development*” dan ukuran pembangunan “*measure of development*”, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pola pembangunan “*pattern of development*” suatu dimensi dihitung dengan menggunakan rumus Gower (1971) dengan sedikit modifikasi. Dalam hal ini penghitungan pola pembangunan dilakukan dengan memberikan bobot yang berbeda (*unequal weighting*) untuk setiap indikator pada masing-masing dimensi sebagai berikut :

$$\pi_{iol} = \sum_{j=1}^{k_i} w_{ij} |z_{ijl} - z_{ijo}|$$



$w_{ij}$  merupakan pembobot untuk variabel/ukuran ke- $j$  pada dimensi ke- $i$ , di mana  $\sum_{j=1}^{k_i} w_{ij} = 1$ . Dalam hal ini, semakin besar/tinggi nilai  $\pi_{iol}$  maka semakin jauh jarak provinsi bersangkutan terhadap provinsi model/acuan.

- b. Ukuran pembangunan suatu dimensi ( $\lambda_i$ ) bernilai antara nol dan satu ( $0 \leq \lambda_i \leq 1$ ). Jika nilai dari ukuran pembangunan suatu dimensi nilainya semakin mendekati satu maka dapat dikatakan bahwa karakteristik dimensi dari provinsi bersangkutan makin jauh dari karakteristik dimensi provinsi model atau dengan kata lain provinsi semakin tidak berkembang. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung nilai ukuran pembangunan suatu dimensi adalah sebagai berikut :

$$\lambda_i = \frac{\pi_{iol}}{\pi_{io}}$$

di mana :

$$\pi_{io} = \bar{\pi}_{io} + 2 \beta_{io}$$

$$\bar{\pi}_{io} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n \pi_{iol}$$

$$\beta_{io} = \sqrt{\sum_{l=1}^n (\pi_{iol} - \bar{\pi}_{io})^2}$$

6. Hitung nilai pola pembangunan "*pattern of development*" dan ukuran pembangunan "*measure of development*" untuk keseluruhan dimensi, dengan ketentuan :
- a. Pola pembangunan keseluruhan dimensi dihitung dengan menggunakan bobot yang berbeda (*unequal weighting*)

untuk setiap indikator pada keseluruhan dimensi, dengan rumus :

$$\pi_{ool} = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{k_i} w_{ij}^* |z_{ijl} - z_{ijo}|$$

$w_{ij}^*$  merupakan pembobot untuk variabel/ukuran ke- $j$  pada

dimensi ke- $i$ ,  $\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^{k_i} w_{ij}^* = 1$ .

- b. Ukuran pembangunan ( $\lambda_o$ ) juga bernilai antara nol dan satu ( $0 \leq \lambda_o \leq 1$ ). Jika nilai dari ukuran pembangunan keseluruhan dimensi nilainya semakin mendekati satu maka provinsi tersebut secara keseluruhan karakteristiknya makin jauh dari karakteristik provinsi model atau dengan kata lain semakin tidak berkembang. Ukuran pembangunan keseluruhan dimensi dihitung dengan rumus :

$$\lambda_o = \frac{\pi_{ool}}{\pi_{oo}}$$

di mana :

$$\pi_{oo} = \bar{\pi}_{oo} + 2 \beta_{oo}$$

$$\bar{\pi}_{oo} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n \pi_{ool}$$

$$\beta_{oo} = \sqrt{\sum_{l=1}^n (\pi_{ool} - \bar{\pi}_{oo})^2}$$

### 3.5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, analisis selain dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas hasil perhitungan indeks komposit disparitas dan peringkat suatu provinsi baik pada level dimensi

maupun keseluruhan dimensi, juga dimaksudkan untuk menjelaskan besaran indeks komposit dan peringkat suatu provinsi dikaitkan dengan potensi wilayah yang tercermin melalui variabel/indikator pengukurnya. Selain itu, analisis juga ditujukan untuk menjelaskan ketertinggalan suatu provinsi terhadap provinsi model yaitu provinsi dengan indeks komposit terendah atau yang memiliki peringkat paling atas.

Pada tahap awal, analisis dilakukan untuk melihat besaran indeks komposit disparitas dan peringkat input pembangunan suatu provinsi ditinjau dari sudut pandang dimensi dan keseluruhan dimensi. Selanjutnya analisis untuk melihat keterkaitan disparitas input pembangunan dengan disparitas output pembangunan “tingkat hidup” suatu provinsi. Dengan mengamati keterkaitan kedua indikator tersebut, diharapkan akan dapat dibuat rekomendasi tentang input pembangunan mana yang dapat ditingkatkan untuk meraih tingkat hidup yang lebih baik di wilayah yang bersangkutan.

# BAB IV

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

*Sub Direktorat Analisis Statistik*



#### **4.1. Hasil Seleksi Variabel Pengukur**

Variabel pengukur disparitas input pembangunan mula-mula dikaji berdasarkan konsep/definisi, kajian teoritis, dan ketersediaan data. Hasil deteksi variabel pada tahap awal ini diperoleh 80 variabel terpilih sebagai kandidat pengukur disparitas input pembangunan. Kemudian seluruh variabel kandidat tersebut diseleksi lebih lanjut melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu, juga dilakukan seleksi variabel normatif terhadap variabel yang gagal lolos uji validitas dan reliabilitas, tetapi diyakini bahwa variabel tersebut dinilai tepat sebagai salah satu pengukur disparitas input pembangunan.

##### **4.1.1. Hasil Uji Validitas**

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa uji validitas ini pada dasarnya untuk menjamin bahwa variabel terpilih secara statistik valid (sahih) untuk mengukur disparitas input pembangunan. Dengan menggunakan jumlah penduduk per desa sebagai validator, hasil uji ini menunjukkan bahwa dari 80 variabel kandidat “selain validator”, 61 diantaranya dinyatakan valid untuk mengukur disparitas input pembangunan. Dari sejumlah variabel yang lolos uji validitas, 7 variabel berasal dari dimensi sumber daya alam, 26 variabel dari dimensi infrastruktur, 10 variabel dari dimensi perekonomian, 10 variabel dari dimensi sumber daya manusia, dan 8 variabel sisanya berasal dari dimensi kelembagaan dan budaya. Dari hasil uji validitas ini, secara keseluruhan “termasuk validator” masih terdapat 62 variabel yang akan dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji validitas secara lengkap seperti pada [Lampiran Tabel C...](#)

##### **4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel yang lolos uji validitas secara statistik terbukti mempunyai hubungan yang erat dengan input pembangunan

yang dalam hal ini diwakili validator. Namun demikian selain valid variabel terpilih juga diharapkan mempunyai kontribusi yang besar terhadap reliabilitas ukuran baik secara sendiri maupun bersama-sama. Makin besar/kuat hubungan antar variabel yang menjadi komponen pengukuran, makin tinggi reliabilitas ukuran. Oleh karena itu, melalui uji reliabilitas ini diharapkan diperoleh suatu ukuran yang reliabilitasnya tinggi meskipun hanya melibatkan sedikit variabel.

Pada bagian ini, 62 variabel yang signifikan berdasarkan uji validitas "termasuk validator" selanjutnya akan diuji dengan uji reliabilitas yang dilakukan per dimensi maupun keseluruhan dimensi. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui reliabilitas ukuran. Jika reliabilitas ukuran masih rendah maka dilakukan upaya meningkatkan reliabilitas dengan mengeluarkan variabel yang kontribusinya rendah terhadap reliabilitas ukuran. Proses pengurangan variabel dapat dilakukan berulang kali, sampai diperoleh beberapa variabel yang secara bersama-sama maupun sendiri memberikan kontribusi yang besar terhadap reliabilitas ukuran. Setelah melalui uji ini, variabel-variabel yang lolos merupakan variabel yang secara statistik layak digunakan untuk mengukur disparitas input pembangunan.

Hasil uji reliabilitas per dimensi secara lengkap seperti pada **Lampiran Tabel C.....** Berdasarkan tabel itu diketahui bahwa jika dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing variabel ( $\bar{r}_i$ ) untuk dimensi sumber daya alam, perekonomian dan kelembagaan dan budaya, dari sejumlah variabel yang diujikan di ketiga dimensi tersebut ternyata masing-masing variabel mempunyai kontribusi yang besar ( $\bar{r}_i > \bar{r}_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$ ), sehingga tidak ada variabel yang dikeluarkan di pengujian tahap I dan proses pemilihan variabel tidak dilanjutkan ke tahap II uji reliabilitas.

Kondisi berbeda terjadi pada dimensi infrastruktur dan sumber daya manusia. Pada kedua dimensi tersebut, proses

pemilihan variabel dilakukan melalui beberapa kali tahapan uji reliabilitas. Sebagai contoh untuk dimensi sumber daya manusia (Tabel 4.1), pada tahap I variabel x410 “persentase penduduk miskin” mempunyai kontribusi rendah terhadap reliabilitas indeks komposit ( $\bar{r}_i \leq \bar{r}_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$ ) sehingga variabel ini dikeluarkan. Kemudian pada tahap II, variabel x412 “jumlah tenaga medis selain dokter per desa” juga memiliki kontribusi yang rendah terhadap reliabilitas indeks komposit, sehingga variabel ini harus dikeluarkan pada tahap II uji reliabilitas. Selanjutnya pada tahap III, dari 9 variabel yang diujikan masing-masing dinilai mempunyai kontribusi yang cukup besar ( $\bar{r}_i > \bar{r}_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$ ) terhadap reliabilitas indeks komposit, sehingga tidak ada lagi variabel yang harus dikeluarkan untuk tahapan pengujian lebih lanjut. Pengurangan variabel x410 dari komponen pengujian tahap I ternyata menyebabkan reliabilitas indeks komposit meningkat dari 0,9304 menjadi 0,9406; sedangkan pengurangan variabel x412 dari komponen pengujian tahap II mampu meningkatkan reliabilitas indeks komposit dari 0,9406 menjadi 0,9499.



**Tabel 4.1. Hasil Uji Reliabilitas Dimensi Sumber Daya Manusia**

Variabel	Reliabilitas Variabel ( $\bar{r}_i$ ) pada setiap Tahapan Pemilihan Variabel		
		I	II
	(1)	(2)	(3)
1 x401	0.5794	0.5945	0.5727
2 x402	0.4723	0.4839	0.5378
3 x408	0.5537	0.5742	0.5935
4 x410	0.2597		
5 x411	0.6283	0.6474	0.6557
6 x412	0.3425	0.3530	
7 x413	0.6832	0.7383	0.7898
8 x414	0.6636	0.7195	0.7737
9 x415	0.6714	0.7272	0.7783
10 x416	0.5420	0.5957	0.6484
11 x417	0.6394	0.6955	0.7510
$\bar{r}_{ij} - \sigma_{r_{ij}}$	0.2884	0.3759	0.4807
$r_{kk}$	0.9304	0.9406	0.9499
k	11	10	9

Selanjutnya pada uji reliabilitas keseluruhan dimensi, hasil uji ini menunjukkan bahwa dari 54 variabel yang diujikan, setelah melalui 4 kali tahapan pengujian 44 variabel diantaranya dinyatakan memiliki kontribusi yang besar terhadap reliabilitas ukuran baik secara individu maupun bersama-sama. Hasil uji reliabilitas keseluruhan dimensi secara lengkap seperti pada Lampiran Tabel C....

#### 4.1.3. Hasil Seleksi Variabel Normatif

Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa seleksi variabel normatif ini bertujuan untuk

menjaring variabel yang tidak lolos uji validitas dan reliabilitas tetapi variabel tersebut diyakini tepat dipakai untuk mengukur disparitas input pembangunan. Berdasarkan hasil penelusuran diperoleh dua variabel yang dipandang tepat mengukur disparitas input pembangunan tetapi tidak lolos pada uji reliabilitas, variabel tersebut adalah PDRB nominal sektor primer per kapita dan PDRB nominal sektor sekunder-tercier per kapita. Oleh karena itu, berdasarkan seleksi variabel normatif ini diputuskan tetap memasukkan kedua variabel ini sebagai salah satu pengukur disparitas input pembangunan.

#### 4.2. Pembobot Variabel

Berdasarkan hasil seleksi variabel (uji validitas, uji reliabilitas, dan seleksi variabel normatif) secara keseluruhan masih terdapat 46 variabel yang akan digunakan untuk mengukur disparitas input pembangunan. Selanjutnya untuk keperluan pemberian pembobot masing-masing variabel dalam penghitungan Indeks Disparitas Input Pembangunan (IDIP) yang dilakukan per dimensi maupun keseluruhan dimensi, variabel-variabel pengukur yang ada di masing-masing dimensi dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Pengelompokkan ini didasarkan pada kesamaan dalam mengukur input pembangunan di setiap dimensi. Sebagai contoh untuk dimensi kelembagaan dan budaya, dimensi ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok pengukur yaitu kelompok 1 mengukur keberadaan kegiatan LSM, kelompok 2 mengukur program TV yang dapat diterima suatu wilayah, kelompok 3 mengukur adanya tindak kejahatan, dan kelompok 4 mengukur ketersediaan tempat penampungan sampah sementara. Secara lengkap hasil pengelompokkan variabel dan besarnya pembobot masing-masing variabel seperti pada [Lampiran Tabel C....](#)

### **4.3. Disparitas Input Pembangunan**

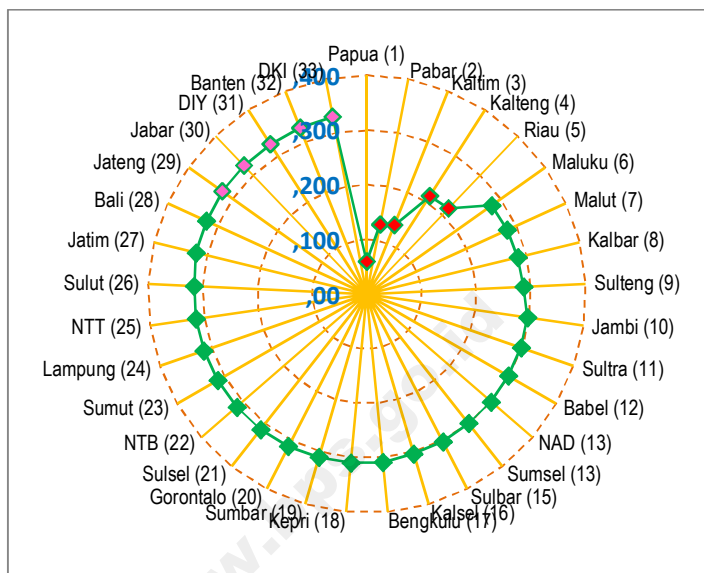
#### **4.2.1. Disparitas Input Pembangunan Per Dimensi**

##### 4.2.1.1. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Sumber Daya Alam

Posisi Indonesia yang berada di daerah katulistiwa dan dilintasi oleh “*the ring of fire*” menjadikan potensi sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah. Kandungan mineral yang berlimpah, luasnya kawasan hutan hujan tropis, serta keberagaman hayati merupakan modal yang sangat berharga untuk mendukung proses pembangunan. Sebagai Negara yang memiliki potensi sumber daya alam besar, menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana potensi sumber daya alam yang ada mampu berperan bagi pembangunan baik itu di daerah maupun nasional secara keseluruhan. Kemampuan masing-masing daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya masih belum merata selain juga karena antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan potensi sumber daya sehingga terjadi kesenjangan pembangunan dalam dimensi sumber daya alam.

Untuk mengetahui kesenjangan input pembangunan dari segi sumber daya alam, selanjutnya dengan menggunakan metoda taksonomik, disusun IDIP dimensi sumber daya alam berdasarkan input data dari dua variabel yang telah lolos uji validitas dan uji reliabilitas yaitu luas wilayah per kapita dan luas kawasan hutan per kapita. Output dari metode taksonomik berupa ukuran pembangunan dan peringkat IDIP di sajikan pada grafik 4.1. Pada grafik tersebut, ukuran pembangunan dan peringkat IDIP dari 33 provinsi dibagi ke dalam empat radius, dimana masing-masing radius menggambarkan tingkat kesenjangan input pembangunan antar provinsi. Provinsi-provinsi yang berada pada radius yang sama dapat dikatakan memiliki kesenjangan input pembangunan yang tidak terlalu besar, sebaliknya jika dua provinsi berada pada radius yang berbeda maka dapat dikatakan memiliki kesenjangan input pembangunan yang lebih besar.

**Grafik 4.1.**  
**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP Dimensi Sumber Daya Alam**  
**Tahun 2009**



Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan
- Kode 1 s.d. 33 di belakang nama provinsi menunjukkan peringkat

Berdasarkan data hasil pengolahan IDIP, diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan dimensi sumber daya alam berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,29. Ukuran pembangunan untuk dimensi sumber daya alam 0,00 dimiliki oleh Provinsi Papua, sedangkan ukuran pembangunan 0,29 yang juga berarti peringkat provinsi terendah pada dimensi sumber daya alam dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ukuran pembangunan pada 33 provinsi di Indonesia tersebar pada tiga radius dengan sebagian besar (29 provinsi) berada pada radius ketiga (0,2-0,3), sedangkan pada radius pertama (0-0,10) dan kedua (0,10-0,20) masing-masing hanya terdapat dua provinsi.

Dari grafik 4.1 terlihat posisi DKI Jakarta sebagai provinsi yang menduduki peringkat terbawah ukuran pembangunan untuk

dimensi sumber daya alam hal ini ditunjukkan oleh nilai ukuran pembangunan yang berada pada posisi paling luar, disertai nomor peringkat 33 di belakang nama Provinsi DKI Jakarta “angka dalam tanda kurung”. Hal ini menunjukkan ketertinggalan provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan provinsi lain dalam pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai input pembangunan.

**Tabel 4.1**  
**Lima Provinsi Dengan Peringkat IDIP Terburuk**  
**Dimensi Sumber Daya Alam**

Provinsi	Luas Wilayah per kapita	Luas kawasan hutan per kapita
(1)	(2)	(3)
31. DKI Jakarta	0,07	0,01
34. DI Yogyakarta	0,89	0,00
32. Jawa Barat	0,85	0,02
33. Jawa Tengah	1,00	0,02
36. Banten	0,99	0,03

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa minimnya kawasan hutan di ibukota provinsi menjadi salah satu alasan utama rendahnya ukuran pembangunan DKI Jakarta pada dimensi sumber daya alam. Selain itu, DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia dengan besaran luas wilayah per kapita terendah. Lima provinsi yang dinilai memiliki potensi input pembangunan dalam dimensi sumber daya alam terendah secara berurutan ditempati oleh Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

**Tabel 4.2**  
**Lima Provinsi Dengan Peringkat IDIP Terbaik**  
**Dimensi Sumber Daya Alam**

Provinsi	Dimensi Sumber Daya Alam
----------	--------------------------

	Pola Pemb.	Ukuran Pemb.	Peringkat IDIP
(1)	(2)	(3)	(4)
94. Papua	0,000	0,000	1
91. Papua Barat	0,617	0,041	2
62. Kalimantan Tengah	2,254	0,149	3
64. Kalimantan Timur	2,761	0,184	4
81. Maluku	3,379	0,225	5

Ditinjau dari peringkat IDIP dimensi sumber daya alam, lima provinsi yang menempati peringkat terbaik dalam potensi input pembangunan secara berturut-turut adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kelima provinsi ini dipandang sebagai provinsi teratas dilihat dari potensi luas wilayah per kapita dan luas kawasan hutan per kapita. Provinsi Papua serta Papua barat memang layak menempati dua posisi teratas peringkat IDIP untuk dimensi sumber daya alam mengingat luas wilayah per kapita dua provinsi tersebut juga menempati urutan pertama dan kedua terbesar. Begitu pun pada aspek luas wilayah hutan per kapita yang juga menempati dua urutan teratas.

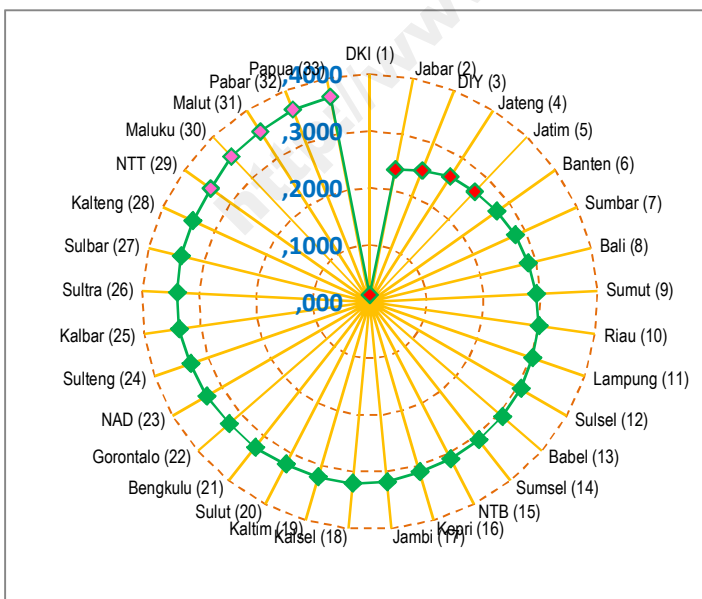
#### 4.2.1.2. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu dimensi pengukur disparitas input pembangunan, yang diyakini sebagai salah satu kunci yang memegang peranan penting dalam meraih sukses pembangunan. Ketiadaan infrastruktur baik dari sisi kuantitas dan kualitas, jelas sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Mengingat begitu pentingnya peranan infrastruktur ini, usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ini terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun perlu disadari bahwa

membangunan bidang infrastruktur bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga meskipun biaya dalam bidang infrastruktur telah banyak dikeluarkan, kesenjangan di bidang infrastruktur ini hingga saat ini masih terasa antar daerah.

Pada bagian ini, kesenjangan antar provinsi yang terjadi di dimensi infrastruktur akan diukur menggunakan 20 indikator yang telah dinyatakan lolos seleksi variabel. Sebelum digunakan untuk menghitung indeks komposit disparitas, kedua puluh variabel tersebut terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam 8 kelompok yang didasarkan pada kesamaan dalam mengukur input pembangunan dimensi infrastruktur. Selanjutnya dengan metoda taksonomik, dihitung IDIP dan peringkat indeks masing-masing provinsi yang hasilnya seperti pada Gambar 4.2. dan Lampiran Tabel C....

**Gambar 4.2.**  
**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP Dimensi Infrastruktur Tahun 2009**



Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan  
Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah menunjukkan peringkat

Dari gambar di atas diketahui bahwa dengan menggunakan nilai ideal sebagai acuan, ukuran pembangunan dimensi infrastruktur dapat dikelompokkan dalam 4 radius jika digunakan interval radius sebesar 0,10. Kaitannya dengan pengelompokan ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang posisinya terletak pada radius pertama, bahkan di radius 2 tidak satupun provinsi menempati radius ini. Secara umum provinsi banyak menempati radius terakhir "radius 4" yang jumlahnya mencapai 24 provinsi, mulai dari Provinsi Riau di posisi terdalam sampai Provinsi Papua di posisi terluar. Kemudian pada radius ketiga ditempati 8 provinsi sisanya, provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, Bali, dan Sumatera Utara.

Hasil pengelompokan provinsi bidang infrastruktur menurut ukuran pembangunan mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi yang berada pada radius yang sama boleh dibilang cenderung memiliki potensi bidang infrastruktur yang hampir sama "tidak jauh berbeda" jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang letaknya berada dalam radius yang berbeda, sehingga kesenjangan diantara provinsi-provinsi yang berada dalam radius yang sama ini tidak begitu jauh. Semakin kecil radius yang ditempati suatu provinsi maka potensi yang dimiliki provinsi bersangkutan juga semakin baik, artinya provinsi yang berada di radius 1 memiliki potensi bidang infrastruktur yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang berada pada radius 2 – radius 4. Oleh karena itu, dengan mengetahui letak provinsi dalam suatu radius dapat dilihat perbedaan potensi "kesenjangan" infrastruktur dengan provinsi yang lain.

Provinsi DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi yang berada di radius pertama dan hampir mendekati pusat radius "0"



menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki potensi paling besar di bidang infrastruktur, bahkan potensinya jauh lebih baik jika dibandingkan potensi infrastruktur 32 provinsi lainnya. Selanjutnya Provinsi Papua yang letaknya di posisi terluar radius 4 secara tidak langsung menunjukkan bahwa provinsi ini kurang memiliki potensi yang memadai di bidang infrastruktur jika dibandingkan dengan 32 provinsi yang lain. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat yang letaknya paling dekat dengan Provinsi DKI Jakarta dan berada di radius 3, menunjukkan bahwa meskipun Jawa Barat memiliki potensi terbesar kedua setelah DKI Jakarta akan tetapi besarnya potensi infrastruktur yang dimiliki Jawa Barat dipandang masih cukup jauh jika dibandingkan dengan potensi infrastruktur DKI Jakarta. Kesenjangan infrastruktur antara DKI Jakarta dengan Jawa Barat diperkirakan sebanding dengan besarnya selisih ukuran pembangunan kedua provinsi tersebut.

Kesenjangan antar provinsi di bidang infrastruktur terjadi akibat perbedaan potensi infrastruktur yang dimiliki antar provinsi. Dari beberapa indikator yang digunakan, kesenjangan antar provinsi selain ditentukan oleh indikator yang berasal dari kelompok indikator yang mempunyai jumlah anggota sedikit juga ditentukan oleh indikator yang memiliki varians yang tinggi. Kaitannya dengan varians indikator, untuk mengetahui indikator yang memiliki varians tinggi jika dibandingkan dengan indikator lain, maka varians tersebut dihitung dari indikator-indikator yang telah dilakukan *rescaling* dalam skala sama. Pada dimensi perekonomian ini, 5 indikator yang sangat menentukan terjadinya kesenjangan dilihat dari besarnya varians antara lain : persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian, persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis, jumlah Perguruan Tinggi, persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat, dan persentase desa menurut ketersediaan wartel (Tabel 4.3).

**Tabel 4.3**

**Varians Masing-masing Indikator Dimensi Infrastruktur  
Keseluruhan Provinsi**

Indikator	varians
Persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian	6.71
Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis	6.12
Jumlah Perguruan Tinggi	5.88
Persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat	5.50
Persentase desa menurut ketersediaan wartel	5.47
Persentase desa yang jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun	5.13
Persentase desa permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/diperkeras	4.82
Persentase desa menurut ketersediaan pasar dengan bangunan permanen	4.44
Persentase desa menurut ketersediaan pos keliling	4.05
Persentase desa menurut ketersediaan restoran/rumah makan	3.34
Jumlah poliklinik/balai pengobatan per kecamatan	3.22
Persentase desa menurut ketersediaan kelompok pertokoan	2.89
Persentase desa menurut ketersediaan hotel	2.81
Persentase desa menurut ketersediaan mini market	2.76
Persentase desa menurut ketersediaan warnet	2.53
Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskup	2.42
Persentase desa menurut ketersediaan kantor pos/pos pembantu	2.41
Jumlah kendaraan bermotor per desa	2.40
Jumlah Bank umum per kabupaten	2.37
Jumlah Rumah Sakit per kabupaten	2.35

Jika indikator yang variansnya besar memicu terjadinya kesenjangan, maka sebaliknya indikator variansnya kecil lebih menunjukkan kedekatan potensi "kesenjangan rendah". Dari pemikiran ini, selanjutnya diteliti kedekatan potensi infrastruktur yang dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada pada radius yang sama dilihat dari variansi indikator pengukurannya. Hasil perhitungan varians masing indikator dimenasi infrastruktur dari provinsi-provinsi di radius 2 seperti pada Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4**  
**Varians Masing-masing Indikator Dimensi Infrastruktur**  
**Dari Provinsi-provinsi di Radius Dua**

Indikator	varians
Persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian	3.78
Persentase desa menurut ketersediaan pos keliling	3.29
Persentase desa menurut ketersediaan restoran/rumah makan	2.65
Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis	2.61
Jumlah Perguruan Tinggi	2.45
Persentase desa menurut ketersediaan wartel	2.21
Persentase desa menurut ketersediaan pasar dengan bangunan permanen	2.14
Persentase desa permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/diperkeras	1.23
Jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan	1.13
Persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat	0.66
Persentase desa yang jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun	0.62
Persentase desa menurut ketersediaan kelompok pertokoan	0.57
Persentase desa menurut ketersediaan kantor pos/pos pembantu	0.23
Persentase desa menurut ketersediaan mini market	0.20
Persentase desa menurut ketersediaan warnet	0.20
Persentase desa menurut ketersediaan hotel	0.14
Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskup	0.09
Jumlah Rumah Sakit per kabupaten	0.02
Jumlah Bank umum per kabupaten	0.02
Jumlah kendaraan bermotor per desa	0.01

Dari tabel di atas diketahui bahwa provinsi-provinsi di radius 3 umumnya memiliki kedekatan potensi infrastruktur utamanya terkait dengan indikator : jumlah kendaraan bermotor per desa, jumlah Bank umum per kabupaten, jumlah Rumah Sakit per kabupaten, persentase desa menurut keberadaan gedung bioskup, dan persentase desa menurut ketersediaan hotel. Sementara itu dari Tabel 4.5 dapat diketahui kedekatan potensi infrastruktur dari provinsi-provinsi di radius 4 utamanya terkait dengan indikator : jumlah Bank umum per kabupaten, jumlah Rumah Sakit per kabupaten, persentase desa menurut ketersediaan kantor pos/pos pembantu, Jumlah kendaraan bermotor per desa, dan persentase desa menurut keberadaan gedung bioskup.

**Tabel 4.5**  
**Varians Masing-masing Indikator Dimensi Infrastruktur**

### Dari Provinsi-provinsi di Radius Tiga

Indikator	varians
Persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian	7.94
Jumlah Perguruan Tinggi	7.40
Persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat	7.16
Persentase desa menurut ketersediaan wartel	6.58
Persentase desa yang jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun	6.41
Persentase desa permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/diperkeras	6.14
Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis	6.11
Persentase desa menurut ketersediaan pasar dengan bangunan permanen	5.35
Persentase desa menurut ketersediaan pos keliling	4.42
Jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan	4.12
Persentase desa menurut ketersediaan kelompok pertokoan	3.82
Persentase desa menurut ketersediaan hotel	3.74
Persentase desa menurut ketersediaan mini market	3.68
Persentase desa menurut ketersediaan restoran/rumah makan	3.52
Persentase desa menurut ketersediaan warnet	3.40
Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskop	3.31
Jumlah kendaraan bermotor per desa	3.30
Persentase desa menurut ketersediaan kantor pos/pos pembantu	3.23
Jumlah Rumah Sakit per kabupaten	3.22
Jumlah Bank umum per kabupaten	3.22

Jika analisis dilakukan dengan mengamati peringkat IDIP dimensi infrastruktur diperoleh informasi bahwa lima provinsi dengan peringkat IDIP terbaik secara berturut-turut adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan lima provinsi yang menempati peringkat IDIP infrastruktur terburuk “peringkat 33-29”, secara berturut-turut ditempati oleh Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (**Gambar 4.2**)

Potensi bidang infrastruktur yang dimiliki 5 provinsi di peringkat teratas lebih lanjut dapat ditelusuri melalui kelompok indikator dan indikator pengukur di masing-masing kelompok tersebut. Jika dilihat 4 kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 menggambarkan ketersediaan infrastruktur kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan, kelompok 3 menggambarkan

ketersediaan infrastruktur perbankan di tingkat kabupaten, dan kelompok 6 yang menggambarkan infrastruktur transportasi di tingkat kabupaten (Tabel 4.6), Provinsi DKI Jakarta secara umum memang memiliki infrastruktur jauh lebih baik dibandingkan 4 provinsi lainnya yang ada di peringkat atas. Terkait dengan infrastruktur kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh jumlah Rumah Sakit "RS" per kabupaten dan jumlah poliklinik/balai pengobatan per kecamatan, di dua indikator ini secara rata-rata DKI Jakarta memiliki sekitar 77 RS per kabupaten dan 6 poliklinik/balai pengobatan per kecamatan. Selanjutnya terkait indikator ketersediaan Bank umum, secara rata-rata DKI Jakarta memiliki sekitar 84 Bank umum per kabupaten. Kemudian untuk infrastruktur transportasi, keunggulan DKI Jakarta tercermin melalui 2 indikator yaitu : jumlah kendaraan bermotor per desa dan indikator persentase desa yang jenis permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/diperkeras.

Selanjutnya dilihat dari 4 kelompok indikator yang ada di Tabel 4.6, Provinsi Jawa Barat yang berada di peringkat 2 dimensi infrastruktur, potensi provinsi ini dapat dilihat dari indikator jumlah rumah sakit per kabupaten dan jumlah Bank umum per kabupaten. Sedangkan potensi infrastruktur Provinsi DI Yogyakarta lebih dikarenakan adanya potensi terkait jumlah Bank umum per kabupaten, jumlah kendaraan bermotor per desa, persentase desa yang permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/diperkeras, dan persentase desa yang ketersediaan jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Potensi infrastruktur Provinsi Jawa Tengah diperlihatkan oleh potensi indikator jumlah poliklinik/balai pengobatan per kecamatan, persentase desa/kelurahan yang jenis permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/ diperkeras, dan persentase desa yang jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Sementara itu Jawa Timur yang berada di peringkat 5, provinsi ini memiliki potensi utamanya terkait dengan indikator jumlah Bank umum per kabupaten dan persentase desa

yang ketersediaan jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.

**Tabel 4.6**  
**Lima Provinsi Peringkat IDIP Terbaik Dimensi Infrastruktur**  
**Kelompok 1, 2, 3, dan 6**

Provinsi	Variabel Pengukur						Peringkat IDIP
	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Kel. 6			
	Jumlah RS per kabupaten (unit)	Jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan (unit)	Jumlah Bank umum per kabupaten (unit)	Jumlah kendaraan bermotor per desa (unit)	Persentase desa yang jenis permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/ diperkeras	Persentase desa yang ketersediaan jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31. DKI Jakarta	77.00	5.45	84.33	49.722.78	100.00	97.00	1
32. Jawa Barat	6.12	2.34	12.96	600.05	97.89	97.51	2
34. DI Yogyakarta	4.25	1.53	10.20	5.865.91	99.77	99.77	3
33. Jawa Tengah	4.59	2.25	7.74	989.59	99.21	99.24	4
35. Jawa Timur	4.76	1.08	9.61	1.162.97	96.67	98.62	5

Keterangan:  
Kel. = kelompok

Selanjutnya ditinjau dari kelompok 4 dan kelompok 7 yang menggambarkan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur pendidikan (Tabel 4.7), keunggulan DKI Jakarta lebih dijelaskan oleh potensi infrastruktur kelompok 4. Pada kelompok ini, potensi infrastruktur DKI Jakarta ditunjukkan oleh indikator : persentase desa menurut ketersediaan mini market, persentase desa menurut ketersediaan restoran/rumah makan, persentase desa menurut ketersediaan hotel, persentase desa menurut ketersediaan kelompok pertokoan, dan persentase desa menurut ketersediaan pasar dengan bangunan permanen. Pada kelima indikator tersebut, secara rata-rata lebih dari 70 persen desa di DKI Jakarta telah tersedia fasilitas infrastruktur ini. Selanjutnya Jawa Barat sebagai provinsi yang berada di peringkat 2 dimensi infrastruktur, provinsi ini memiliki potensi yang paling besar terkait jumlah Perguruan Tinggi yang mencapai sekitar 403 unit.

Sedangkan DI Yogyakarta memiliki potensi yang paling tinggi terkait indikator persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian yang mencapai 67.58 persen.

**Tabel 4.7**  
**Lima Provinsi Peringkat IDIP Terbaik Dimensi Infrastruktur**  
**Kelompok 4 dan 7**

Provinsi	Variabel Pengukur							Peringkat IDIP
	Kel. 4						Kel. 7	
	Persentase desa menurut ketersediaan mini market	Persentase desa menurut ketersediaan restoran/ rumah makan	Persentase desa menurut ketersediaan hotel	Persentase desa menurut ketersediaan kelompok pertokoan	Persentase desa menurut ketersediaan pasar dengan bangunan permanen	Persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian	Jumlah Perguruan Tinggi (unit)	
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
31. DKI Jakarta	91.76	92.13	37.83	80.90	64.42	3.00	335.00	1
32. Jawa Barat	18.67	29.65	4.94	19.95	14.32	51.47	403.00	2
34. DI Yogyakarta	33.79	34.93	12.33	41.55	56.16	67.58	133.00	3
33. Jawa Tengah	9.70	13.10	4.19	18.59	22.37	40.25	260.00	4
35. Jawa Timur	11.75	13.94	3.96	19.76	23.81	54.67	337.00	5
Keterangan:								
Kel. = kelompok								

Ditinjau dari indikator-indikator infrastruktur yang ada di kelompok 5 dan kelompok 8 yang menggambarkan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur sosial budaya, secara keseluruhan indikator potensi infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta terlihat jauh lebih baik. Pada 2 kelompok infrastruktur ini, meskipun DI Yogyakarta yang berada di peringkat 2 tetapi provinsi ini memiliki potensi infrastruktur lebih baik dibandingkan potensi infrastruktur yang dimiliki Jawa Barat yang secara peringkat berada di posisi 2 (Tabel 4.8).

**Tabel 4.8**  
**Lima Provinsi Peringkat IDIP Terbaik Dimensi Infrastruktur**  
**Kelompok 5 dan 8**

Provinsi	Variabel Pengukur							Peringkat IDIP
	Kel. 5				Kel. 8			
	Persentase desa menurut ketersediaan wartel	Persentase desa menurut ketersediaan warnet	Persentase desa menurut ketersediaan kantor pos/pos pembantu	Persentase desa menurut ketersediaan pos keliling	Persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat	Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis	Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskop	
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
31. DKI Jakarta	99.63	94.01	64.42	42.70	98.88	96.25	13.11	1
32. Jawa Barat	86.76	12.81	7.94	19.81	83.35	82.52	0.58	2
34. DI Yogyakarta	83.11	24.66	19.86	25.11	90.41	94.52	0.68	3
33. Jawa Tengah	58.78	6.81	6.12	20.49	85.68	71.82	0.21	4
35. Jawa Timur	66.83	8.82	6.13	15.67	86.28	45.44	0.34	5
Keterangan:								
Kel. = kelompok								

Jika dilihat 4 kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 menggambarkan ketersediaan infrastruktur kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan, kelompok 3 menggambarkan ketersediaan infrastruktur perbankan di tingkat kabupaten, dan kelompok 6 yang menggambarkan infrastruktur transportasi di tingkat kabupaten (Tabel 4.6), Provinsi DKI Jakarta secara umum memang memiliki infrastruktur jauh lebih baik dibandingkan 4 provinsi lainnya yang ada di peringkat atas. Terkait dengan infrastruktur kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh jumlah Rumah Sakit “RS” per kabupaten dan jumlah poliklinik/balai pengobatan per kecamatan, di dua indikator ini secara rata-rata DKI Jakarta memiliki sekitar 77 RS per kabupaten dan 6 poliklinik/balai pengobatan per kecamatan. Selanjutnya terkait indikator ketersediaan Bank umum, secara rata-rata DKI Jakarta memiliki sekitar 84 Bank umum per kabupaten. Kemudian untuk infrastruktur transportasi, keunggulan DKI Jakarta tercermin melalui 2 indikator yaitu : jumlah kendaraan bermotor per desa dan indikator persentase desa yang jenis permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/diperkeras.

Kesenjangan infrastruktur yang terjadi di Provinsi Papua memang nampak dari hampir seluruh indikator pendukungnya.



Dalam hal ini, selain indikator jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan, jumlah Perguruan Tinggi, dan persentase desa menurut keberadaan gedung bioskop yang masing-masing berada pada peringkat 11, 19, dan 22, di 17 indikator lainnya peringkat Provinsi Papua boleh dibilang mendekati peringkat terbawah. Sebagai contoh, kaitanya dengan indikator jumlah RS per kabupaten dan jumlah poliklinik/balai pengobatan per kecamatan, secara rata-rata ketersediaan kedua indikator ini tidak lebih dari 1 (satu) unit. Kemudian pada indikator bank umum per kabupaten, jumlahnya juga tidak lebih dari 1 unit. Bahkan pada indikator persentase desa menurut keberadaan gedung bioskop, persentasenya di bawah 1 persen.

**Tabel 4.9**  
**Lima Provinsi Peringkat IDIP Terburuk Dimensi Infrastruktur**  
**Kelompok 1, 2, 3, dan 6**

Provinsi	Variabel Pengukur						Peringkat IDIP
	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Kel. 6			
	Jumlah RS per kabupaten (unit)	Jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan (unit)	Jumlah Bank umum per kabupaten (unit)	Jumlah kendaraan bermotor per desa (unit)	Persentase desa yang jenis permukiman jalan terluas berupa aspal/beton/ diperkeras	Persentase desa yang ketersediaan jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
53. NTT	1.32	0.36	2.05	262.35	73.77	85.19	29
81. Maluku	1.89	0.43	2.27	287.47	57.65	50.77	30
82. Maluku Utara	1.33	0.08	1.44	28.93	67.24	58.11	31
91. Papua Barat	1.25	0.27	1.73	0.00	46.79	43.82	32
94. Papua	0.62	0.67	1.41	132.71	24.37	26.46	33
Keterangan:							
Kel. = kelompok							

Selanjutnya ditinjau dari kelompok 4 dan kelompok 7 yang menggambarkan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur pendidikan (Tabel 4.7), keunggulan DKI Jakarta lebih dijelaskan

**Tabel 4.10**  
**Lima Provinsi Peringkat IDIP Terburuk Dimensi Infrastruktur**

### Kelompok 4 dan 7

Provinsi	Variabel Pengukur							Peringkat IDIP
	Kel. 4						Kel. 7	
	Persentase desa menurut ketersediaan mini market	Persentase desa menurut ketersediaan restoran/ rumah makan	Persentase desa menurut ketersediaan hotel	Persentase desa menurut ketersediaan kelompok pertokoan	Persentase desa menurut ketersediaan pasar dengan bangunan permanen	Persentase desa menurut ketersediaan kios sarana produksi pertanian	Jumlah Perguruan Tinggi (unit)	
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
53. NTT	1.00	3.67	3.07	3.21	12.81	7.14	36.00	29
81. Maluku	2.87	6.51	2.54	4.86	7.40	10.93	20.00	30
82. Maluku Utara	2.70	6.27	1.35	2.61	7.43	7.92	12.00	31
91. Papua Barat	1.49	2.32	2.16	1.41	4.90	6.97	16.00	32
94. Papua	1.39	2.30	1.24	1.81	5.26	7.34	37.00	33
Keterangan: Kel. = kelompok								

Ditinjau dari indikator-indikator infrastruktur yang ada di kelompok 5 dan kelompok 8 yang menggambarkan ketersediaan

**Tabel 4.11**  
**Lima Provinsi Peringkat IDIP Terburuk Dimensi Infrastruktur**  
**Kelompok 4 dan 7**

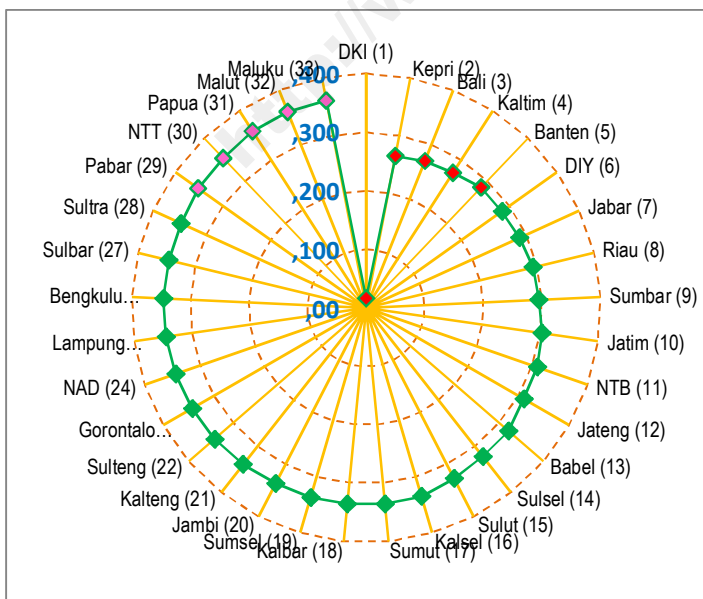
Provinsi	Variabel Pengukur							Peringkat IDIP
	Kel. 5					Kel. 8		
	Persentase desa menurut ketersediaan wartel	Persentase desa menurut ketersediaan warnet	Persentase desa menurut ketersediaan kantor pos/pos pembantu	Persentase desa menurut ketersediaan pos keliling	Persentase desa yang menurut ketersediaan sinyal telepon genggam kuat	Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis	Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskop	
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
53. NTT	4.14	1.71	2.67	2.85	45.99	13.99	0.00	29
81. Maluku	15.56	1.43	4.42	4.19	21.08	13.02	0.11	30
82. Maluku Utara	10.62	1.06	2.22	4.25	28.19	14.29	0.00	31
91. Papua Barat	4.66	1.21	1.53	2.89	13.28	5.48	0.00	32
94. Papua	4.16	0.97	1.23	1.61	8.58	4.44	0.00	33
Keterangan: Kel. = kelompok								

Ditinjau dari indikator-indikator infrastruktur yang ada di kelompok 5 dan kelompok 8 yang menggambarkan ketersediaan

### 4.2.1.3. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Perekonomian

Selain dimensi sumber daya alam dan infrastruktur, perekonomian juga merupakan salah satu dimensi yang sangat penting perannya dalam mendukung sukses pembangunan. Pada bagian ini, kesenjangan yang terjadi pada dimensi perekonomian akan dijelaskan melalui 8 variabel pengukur yang telah dinyatakan lolos seleksi variabel. Dengan menggunakan 8 variabel pengukur tersebut, selanjutnya dihitung indeks disparitas input pembangunan (IDIP) dan peringkat indeks dimensi perekonomian masing-masing provinsi, hasilnya seperti pada Gambar 4.3. dan [Lampiran Tabel C....](#)

**Grafik 4.3.**  
**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP Dimensi Perekonomian Tahun 2009**



Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan
- Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah menunjukkan peringkat

Dari gambar dan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum nilai ukuran pembangunan dimensi perekonomian dapat dikelompokkan menjadi 4 radius "kelompok", dimana masing-masing radius menggunakan interval sebesar 0,10. Seperti halnya pada dimensi infrastruktur, hasil pengelompokkan dimensi perekonomian juga menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi yang letaknya berada dalam radius pertama. Selain itu, pada radius 2 juga tidak satupun provinsi menempati radius ini. Kemudian pada radius 3 dihuni 8 provinsi, posisi terdalam di radius ditempati Provinsi Kepulauan Riau dan posisi terluar dihuni Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya pada radius terakhir "radius 4" dimensi perekonomian dihuni 24 provinsi, posisi paling dalam ditempati Provinsi Jawa Timur dan posisi paling luar ditempati Provinsi Maluku.

Seperti halnya dimensi sumber daya alam dan dimensi infrastruktur, hasil pengelompokkan ukuran pembangunan dimensi perekonomian juga berfungsi untuk menunjukkan kesenjangan antar provinsi di bidang perekonomian. Provinsi DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi yang berada di radius 1 jelas menggambarkan adanya kesenjangan di bidang perekonomian antara provinsi DKI Jakarta dengan 32 provinsi lainnya. Hasil pengelompokkan ini juga menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang berada dalam radius yang sama juga boleh dibidang cenderung memiliki potensi perekonomian yang hampir berdekatan, sehingga kesenjangan diantara provinsi-provinsi tersebut cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang berada dalam radius berbeda. Selain itu, nilai ukuran pembangunan DKI Jakarta yang mendekati 0 juga menunjukkan bahwa dari 8 indikator pengukur dimensi

perekonomian, input terbaik di dimensi ini secara mayoritas hampir ditempati DKI Jakarta.

Selanjutnya dengan mengamati peringkat IDIP dimensi perekonomian terlihat bahwa lima provinsi yang menempati peringkat IDIP terbaik secara berturut-turut adalah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, dan Banten. Sedangkan lima provinsi yang menempati peringkat IDIP terendah, secara berturut-turut mulai dari peringkat paling bawah adalah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat (Tabel 4.3).

Kemudian jika hasil pemeringkatan tersebut ditelusuri lebih lanjut melalui kelompok indikator dan indikator pengukur dimensi perekonomian, keunggulan DKI Jakarta di bidang perekonomian karena memang didukung oleh potensi perekonomian yang tercermin melalui kelompok 1 dan kelompok 2 pendukung perekonomian. Pada kelompok 1 diwakili indikator PDRB sektor sekunder-tercier per kapita, secara nominal PDRB DKI Jakarta menempati perijaudan kelompok 2. Sebagai contoh, pada indikator PDRB Nominal sektor sekunder-tercier per kapita, secara nominal PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta mencapai sekitar 82,08 juta rupiah menempati peringkat terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur (88,92 juta rupiah). Kemudian pada 3 indikator : persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Industri Kecil & Kerajinan Rakyat, dan persentase desa yang menurut ketersediaan koperasi non KUD, DKI Jakarta berada diperingkat pertama dengan persentase masing-masing indikator berturut-turut sekitar 38,58 persen, 3,37 persen, dan 34,46 persen. Selanjutnya pada indikator persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Simpan Pinjam, persentase DKI Jakarta mencapai sekitar 61,8 persen menempati peringkat 2 di bawah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada 2 indikator : persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Lainnya dan persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit

Usaha Kecil (KUK), Provinsi DKI Jakarta masih berada di peringkat 7 dan 11 dengan persentase masing-masing sebesar 44,57 persen dan 28,84 persen.

Sementara itu, kesenjangan perekonomian yang terjadi di Provinsi Maluku karena memang kurangnya dukungan dari indikator pendukungnya. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan PDRB nominal per kapita, Provinsi Maluku secara nominal memiliki PDRB per kapita sebesar 5,28 juta rupiah, angka ini cukup jauh jika dibandingkan PDRB nominal per kapita Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, desa/kelurahan di Provinsi Maluku yang sudah tersedia fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Lainnya, Koperasi Industri Kecil & Kerajinan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Non KUD masing-masing jumlahnya tidak lebih dari 10 persen.

Provinsi	Variabel Pengukur								Peringkat IDIP
	PDRB nominal sektor sekunder per kapita (juta Rp)	Total investasi per kabupaten (miliar Rp)	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Usaha Kecil (KUK)	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Lainnya	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Industri Kecil & Kerajinan Rakyat	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Non KUD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
31. DKI Jakarta	81.66	10.249.220.00	28.84	38.58	44.57	3.37	61.80	34.46	1
21. Kep Riau	36.36	344.082.86	25.15	14.11	31.90	1.84	38.04	18.10	2
51. Bali	13.16	242.942.22	52.11	22.19	73.60	2.95	65.73	16.15	3
64. Kalimantan Timur	1.84	0.14	3.00	4.20	0.32	19.00	3.76	0.27	4
36. Banten	4.43	0.33	32.00	3.58	0.27	6.00	3.90	0.28	5

Provinsi	Variabel Pengukur								Peringkat IDIP
	PDRB nominal sektor sekunder per kapita (juta Rp)	Total investasi per kabupaten (miliar Rp)	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Usaha Kecil (KUK)	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Lainnya	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Industri Kecil & Kerajinan Rakyat	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Non KUD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
91. Papua Barat	1.75	0.13	2.00	4.76	0.36	32.00	4.83	0.35	29
53. Nusa Tenggara Timur	4.27	0.32	25.00	4.49	0.34	29.00	4.85	0.35	30
94. Papua	0.81	0.06	1.00	4.80	0.37	33.00	4.92	0.36	31
82. Maluku Utara	3.82	0.28	7.00	4.65	0.36	31.00	4.94	0.36	32
81. Maluku	3.78	0.28	6.00	4.61	0.35	30.00	4.94	0.36	33

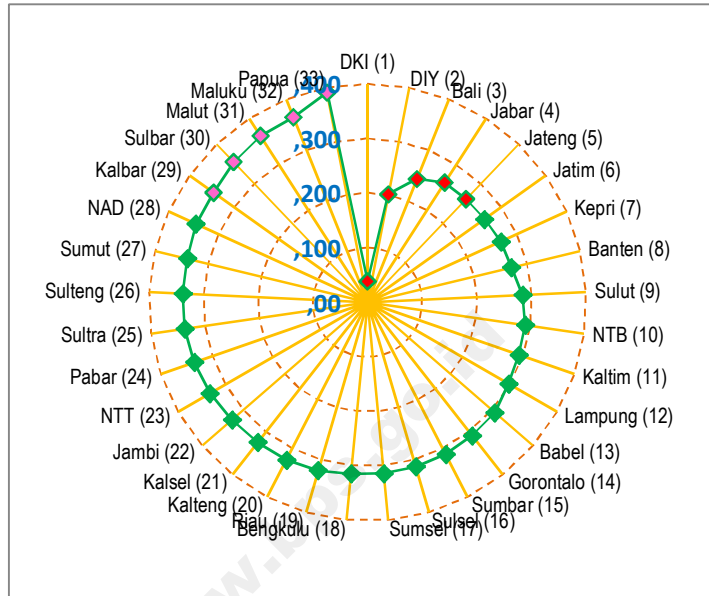
#### 4.2.1.4. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Sumber Daya Manusia

Pembangunan di suatu daerah tak terlepas dari peran serta kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Pendidikan, kesehatan, dan juga masalah ketenagakerjaan menjadi isu utama yang berkaitan dengan pembangunan pada dimensi sumber daya manusia. Sebagai Negara yang termasuk lima besar di dunia dalam hal jumlah penduduk, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Berdasarkan hasil SP2010, tercatat penduduk Indonesia berjumlah sekitar 237 juta jiwa yang tersebar di 33 provinsi. Sayangnya, Indonesia masih memiliki masalah baik itu di dunia pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan.

Untuk melihat sejauh mana ketimpangan potensi sumber daya manusia pada masing-masing daerah, selanjutnya dengan menggunakan metoda taksonomik disusun IDIP dimensi sumber daya manusia berdasarkan input data dari delapan variabel yang telah lolos uji validitas dan uji reliabilitas yaitu Jumlah penduduk per desa, persentase penduduk usia kerja, persentase penduduk bekerja di sektor manufaktur, jumlah dokter per desa, Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG, Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi DPT, Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Polio, dan Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Hepatitis B.

Output dari metode taksonomik berupa pola pembangunan di sajikan pada grafik 4.4. Peringkat IDIP dimensi sumber daya manusia dan ukuran pembangunan dari 33 provinsi terbagi ke dalam empat radius yang masing-masing radius menggambarkan tingkat kesenjangan pembangunan dari segi sumber daya manusia antar wilayah/provinsi. Ukuran pembangunan dimensi sumber daya manusia dari 33 provinsi di Indonesia tersebar hingga ke radius ke empat. Ini menunjukkan terjadi kesenjangan pembangunan pada dimensi sumber daya manusia yang dapat diakibatkan oleh kurang meratanya kualitas pendidikan, kesehatan, dan juga pada bidang ketenagakerjaan.

**Grafik 4.4.**  
**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP Dimensi Sumber Daya Manusia**  
**Tahun 2009**



Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan
- Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah menunjukkan peringkat

Berdasarkan data hasil pengolahan IDIP, diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan dimensi sumber daya manusia berada pada rentang skala 0,07 hingga 0,38. Ukuran pembangunan untuk dimensi sumber daya manusia 0,07 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, sedangkan ukuran pembangunan 0,38 dimiliki oleh Provinsi Papua. Dari grafik 4.4 terlihat posisi DKI Jakarta sebagai provinsi yang menduduki peringkat teratas dalam hal ukuran pembangunan dimensi sumber daya manusia.

**Tabel 4.1**  
**Lima Provinsi Dengan Peringkat IDIP Terbaik**  
**Dimensi Sumber Daya Manusia**



Provinsi	Dimensi Sumber Daya Alam		
	Pola Pemb.	Ukuran Pemb.	Peringkat IDIP
(1)	(2)	(3)	(4)
31. DKI Jakarta	0,82648	0,06956	1
34. DI Yogyakarta	1,89331	0,15935	2
21. Kep Riau	2,19760	0,18496	3
36. Banten	2,37030	0,19949	4
33. Jawa Tengah	2,38138	0,20042	5

Lima provinsi yang menduduki peringkat lima besar terbaik ukuran pembangunan dan IDIP dimensi sumber daya manusia secara berturut-turut adalah Provinsi Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta pada urutan pertama. Jika diperhatikan, sebagian besar provinsi yang menduduki peringkat teratas ukuran pembangunan adalah provinsi yang berada di Indonesia bagian barat, bahkan jika dipersempit lagi sebagian besar berada di pulau jawa.

**Tabel 4.2**  
**Lima Provinsi Dengan Peringkat IDIP Terburuk**  
**Dimensi Sumber Daya Alam**

Provinsi	Dimensi Sumber Daya Alam		
	Pola Pemb.	Ukuran Pemb.	Peringkat IDIP
(1)	(2)	(3)	(4)
61. Kalimantan Barat	3,86238	0,32507	29

---

76. Sulawesi Barat	3,97660	0,33468	30
82. Maluku Utara	4,14422	0,34879	31
81. Maluku	4,16686	0,35069	32
94. Papua	4,46617	0,37588	33

---

Lima provinsi yang menduduki peringkat lima terbawah ukuran pembangunan dan IDIP dimensi sumber daya manusia secara berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, serta Papua. Jika peringkat teratas provinsi-provinsi dengan ukuran pembangunan dimensi sumber daya manusia sebagian besar dimiliki oleh provinsi-provinsi asal Indonesia bagian barat, maka sebaliknya peringkat terbawah sebagian besar berasal dari Indonesia bagian timur. Pembangunan manusia di Indonesia timur memang masih belum maksimal. Masih rendahnya kesadaran akan arti penting pendidikan, kesehatan, diperburuk dengan masih minimnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya.

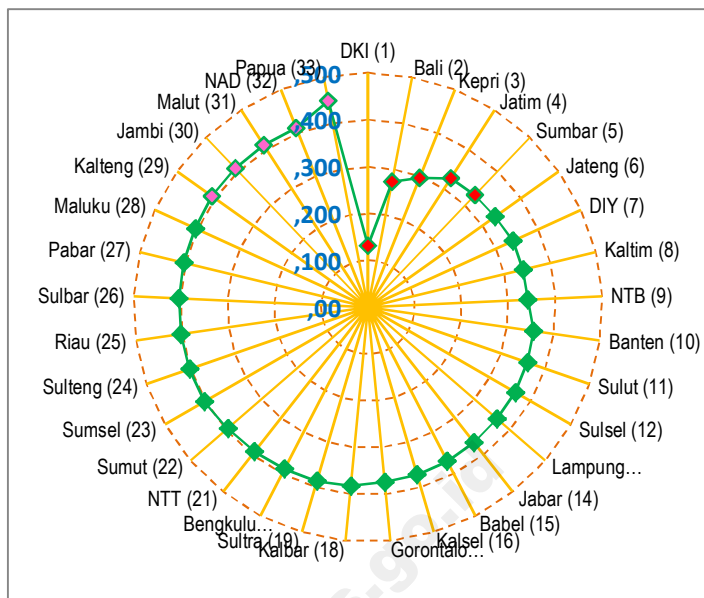
#### 4.2.1.5. Disparitas Input Pembangunan Dimensi Kelembagaan dan Budaya

Kelembagaan dan budaya menjadi salah satu inputan pembangunan yang penting mengingat dalam era globalisasi saat ini kelembagaan bisa memberikan dampak positif. Dampak tersebut bisa langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh yang paling nyata adalah dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat maka banyak masukan kepada pemerintah mengenai keadaan masyarakat yang sebenarnya di lapangan. Masalah budaya juga menjadi inputan yang positif pada pembangunan. Contoh yang nyata adalah budaya gotong royong, budaya saling tolong menolong. Semua ini bisa dilakukan dengan bantuan teknologi komunikasi.

Ada 9 variabel yang digunakan dalam pengukuran disparitas input pembangunan dimensi Kelembagaan dan Budaya. Variabel-variabel ini setelah melewati uji validitas dan uji reliabilitas hanya tinggal 7 variabel yang lolos dan bisa mewakili dimensi ini. Variabel tersebut adalah Persentase desa menurut keberadaan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), persentase desa yang dapat menerima program TVRI, persentase desa yang dapat menerima program TV swasta nasional, persentase desa yang dapat menerima program TV lokal, persentase desa yang mengalami tindak kejahatan pencurian, persentase desa yang mengalami tindak kejahatan narkoba, dan persentase desa yang mempunyai tempat penampungan sampah sementara. Seluruh variabel ini lolos uji validitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, dengan validator yang digunakan adalah jumlah penduduk. Dari 33 provinsi yang termasuk 5 terbaik untuk dimensi kelembagaan dan budaya adalah masing-masing: provinsi DKI Jakarta, provinsi Bali, provinsi Riau, provinsi Jawa Timur dan provinsi Sumatera Barat. Jika ditelusuri lebih jauh maka keunggulan provinsi DKI Jakarta adalah pada keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang berada pada lebih dari 68 persen desa di DKI Jakarta, diikuti oleh seluruh desa yang sudah menikmati siaran TVRI, dan TV swasta nasional, dan juga lebih dari 98 persen desanya terjangkau oleh TV lokal. Disisi lain tindak kejahatan pencurian yang terjadi pada lebih dari 69 persen desa, dan tindak kejahatan Narkoba pada lebih dari 33 persen desa cukup memberikan dampak negatif pada uji validitas ini. Provinsi Bali yang menempati urutan kedua terbaik mempunyai kelebihan pada telah terjangkaunya program TVRI, TV Swasta nasional maupun TV lokal pada masing-masing 94,4, 90,0, dan 87,9 persen dari desa.

**Grafik 4.5.**

**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP Dimensi Kelembagaan dan Budaya Tahun 2009**



Keterangan :

■ : Nilai ukuran pembangunan

Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah menunjukkan peringkat

Provinsi yang berada pada peringkat 5 terakhir dalam pengukuran disparitas input pembangunan pada dimensi kelembagaan dan budaya ini adalah provinsi Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku Utara, Jambi dan provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Papua mempunyai persentase rendah pada variabel-variabel persentase desa menurut keberadaan kegiatan LSM, desa-desa yang terjangkau TVRI, TV Swasta nasional dan TV lokal dan tempat pembuangan sampah sementara, juga mempunyai persentase yang relatif cukup tinggi pada desa yang mengalami tindak kejahatan pencurian. Hal ini mengakibatkan indeks disparitas input untuk provinsi Papua menjadi kecil. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada pada urutan kedua terakhir yang disebabkan oleh hamper tidak adanya aktivitas lembaga swadaya masyarakat dan juga masih banyaknya desa yang belum terjangkau oleh siaran TV, baik nasional maupun

swasta. Urutan ketida terbawah adalah provinsi Maluku utara dengan alas an yang hampir serupa dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gambaran selengkapnya bisa dilihat pada grafik 4.5.

#### **4.2.2. Disparitas Input Pembangunan Keseluruhan Dimensi**

Yang dimaksud dengan keseluruhan dimensi adalah penggabungan dari dimensi-dimensi sebelumnya yaitu dimensi sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan dan budaya. Ukuran disparitas input pembangunan keseluruhan dimensi dilihat dari indeks komposit yang dihitung kembali dengan masing-masing dimensi sebagai inputnya. Setiap provinsi mempunyai kekuatan input yang bisa berbeda. Provinsi Papua misalnya mempunyai kekuatan dibidang sumber daya alam, sementara provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai sumber daya alam, atau provinsi DI Yogyakarta juga tidak mempunya sumber daya alam tetapi mempunyai kekuatan pada infrastruktur dan sumber daya manusianya. Kekuatan-kekuatan ini menjadi saling melengkapi sebagai inputan pembangunan.

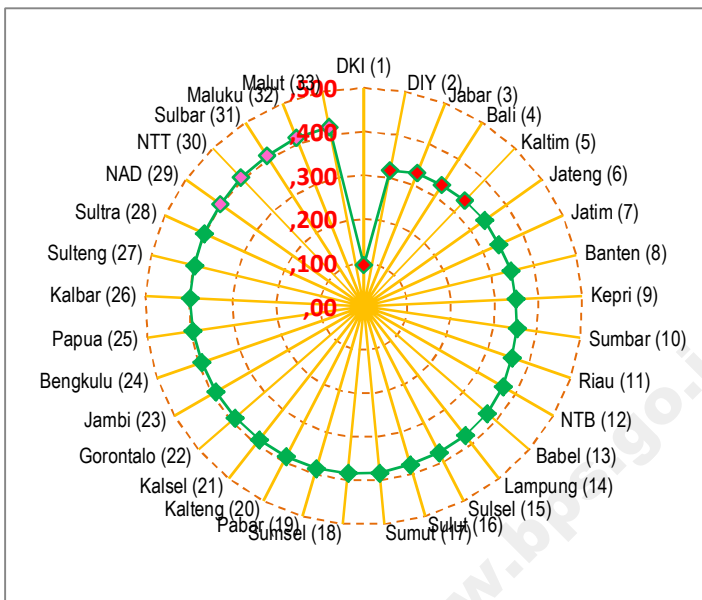
Untuk keseluruhan dimensi ada 59 variabel kandidat “selain validator” yang dinyatakan valid berdasarkan uji validitas untuk mengukur disparitas input pembangunan. Setelah dilakukan uji reliabilitas untuk keseluruhan dimensi maka variable yang bisa dipakai untuk mengukur disparitas input pembangunan hanya tersisa 44 variabel termasuk variabel yang digunakan untuk validator. Variabel tersebut terdiri dari 2 variabel dari dimensi sumber daya alam, 20 variabel dari dimensi infrastruktur, 7 variabel dari dimensi perekonomian, 8 variabel dari dimensi sumber daya manusia, dan 7 variabel dari dimensi kelembagaan dan budaya.

Setelah dilakukan pembobotan maka untuk keseluruhan dimensi, urutan 5 provinsi terbaik adalah provinsi DKI Jakarta, provinsi DI Yogyakarta, provinsi Bali, provinsi Jawa Barat, dan provinsi Jawa Tengah. Untuk 5 provinsi terakhir adalah provinsi Maluku Utara, provinsi Maluku, provinsi Sulawesi Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur, dan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jika dilakukan penelusuran lebih lanjut maka untuk provinsi DKI Jakarta kekuatan yang menjadi dasar bagi pembangunan adalah infrastruktur yang baik, aktivitas perekonomian, sumber daya manusia, dan kelembagaan dan budaya. Walaupun dari sisi sumber daya alam provinsi DKI Jakarta berada pada urutan terakhir, atau dengan kata lain tidak ada sumber daya alam yang mampu menjadi input pembangunan tetapi dimensi lain ternyata lebih berperan. Provinsi yang menduduki peringkat kedua yaitu provinsi DI Yogyakarta juga keadaannya hampir sama dengan provinsi DKI Jakarta yaitu sama-sama tidak mempunyai sumber daya alam. Tetapi ada kekuatan inputan yang lain yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Kalau dilihat dari grafik 4.6 walaupun provinsi DKI Jakarta urutan pertama, dan provinsi DI Yogyakarta urutan kedua tetapi kedua provinsi ini berada pada ukuran radar yang berbeda. Provinsi DKI Jakarta berada pada lingkaran kedua sedangkan provinsi DI Yogyakarta berada pada lingkaran ketiga. Artinya tingkat kesejahteraan penduduk provinsi DKI Jakarta berdasarkan inputan pembangunan cukup jauh diatas tingkat kesejahteraan penduduk provinsi DI Yogyakarta.

Peringkat ketiga untuk keseluruhan dimensi adalah provinsi Bali. Kekuatan provinsi Bali ada pada dimensi kelembagaan dan budaya serta dimensi perekonomian. Sebenarnya hasil ini cukup bisa diterima mengingat bahwa provinsi Bali merupakan tujuan wisata kelas dunia dengan kelebihan budayanya. Dari grafik 4.6 indeks disparitas provinsi Bali tidak berada jauh dari provinsi DI Yogyakarta.

**Grafik 4.6.**  
**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP**  
**Keseluruhan Dimensi Tahun 2009**



Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan
- Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah menunjukkan peringkat

Provinsi yang berada pada urutan terakhir adalah provinsi Maluku Utara. Walaupun sebenarnya provinsi ini mempunyai sumber daya alam sebagai input pembangunan yang dapat menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tetapi tidak cukup untuk menutupi kekurangan pada dimensi lainnya. Urutan kedua terbawah adalah provinsi yang mempunyai kelemahan dimensi yang hampir sama dengan provinsi Maluku Utara. Urutan ketiga terakhir adalah provinsi Sulawesi Barat. Gambaran tentang urutan indeks keseluruhan dimensi bisa dilihat pada grafik 4.6.

#### 4.4. Keterkaitan Disparitas Tingkat Hidup dengan Input Pembangunan

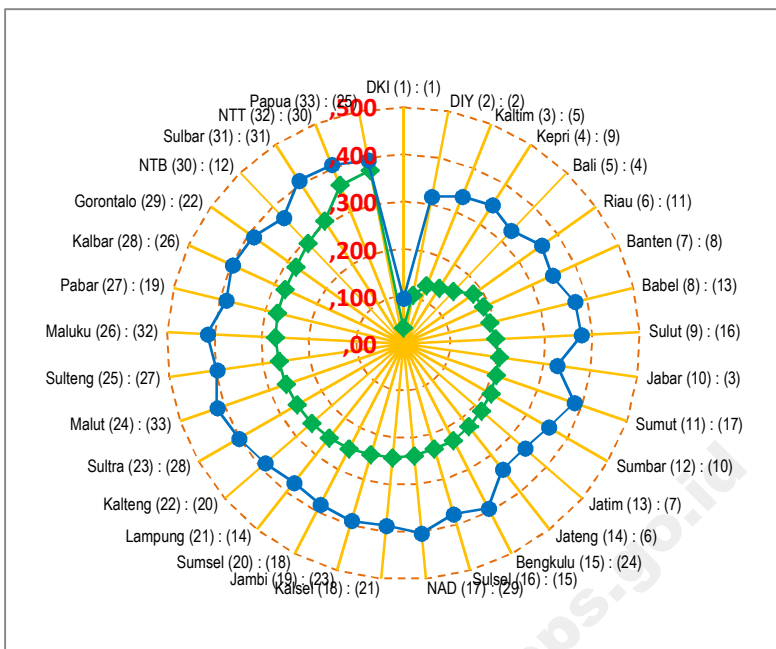
Pada penelitian ini, disparitas tingkat hidup diukur dengan menggunakan 26 variabel pengukur yang lolos uji validitas dan uji reliabilitas pada publikasi disparitas tahun lalu “2009”. Pada penelitian itu, kesenjangan tingkat hidup antar provinsi yang terjadi tahun 2008 hanya dijelaskan melalui potensi perekonomian wilayah yang saat itu diwakili satu indikator yaitu PDRB per kapita tahun 2008. Pada penelitian sekarang, kesenjangan tingkat hidup antar provinsi tahun 2009 akan dijelaskan melalui 44 indikator input yang berasal 5 dimensi yaitu sumber daya alam, infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, dan kelembagaan dan budaya.

Dengan menggunakan variabel-variabel pengukur tingkat hidup “output” dan input pembangunan, penyandingan hasil penghitungan indeks komposit disparitas output dan input pembangunan antar provinsi seperti nampak pada **Gambar 4.7** berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa dengan menggunakan interval yang sama “0,10”, ukuran pembangunan dari input pembangunan dikelompokkan menjadi 5 radius, 1 level lebih banyak jika dibandingkan pengelompokkan ukuran pembangunan dari tingkat hidup “4 radius”. Perbedaan jumlah kelompok ukuran pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar provinsi di input pembangunan boleh dibidang sedikit lebih lebar jika dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di tingkat hidup “output pembangunan”.

##### **Grafik 4.7.**

**Hubungan Antara Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDTHAP dan IDIP Keseluruhan Dimensi Tahun 2009**





Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan tingkat hidup “output pembangunan keseluruhan dimensi
- : Nilai ukuran pembangunan input pembangunan keseluruhan dimensi

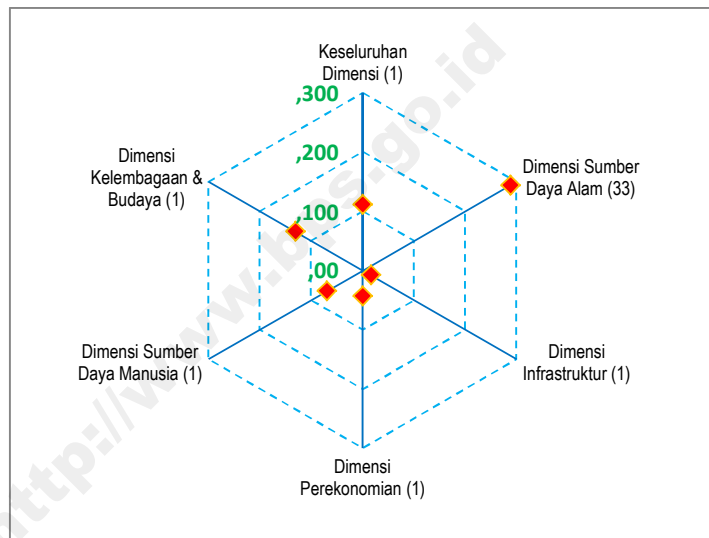
Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah dan letaknya didepan tanda “:” menunjukkan peringkat tingkat hidup “output pembangunan”, sedangkan yang letaknya dibelakang tanda “:” menunjukkan peringkat input pembangunan

Selain itu berdasarkan Gambar 4.7 juga terlihat bahwa lima provinsi yang menempati peringkat teratas tingkat hidup secara berturut-turut yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Bali. Sementara itu, lima provinsi yang menempati 5 peringkat terbawah “33-29” tingkat hidup secara berurutan adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.

Selanjutnya jika peringkat tingkat hidup ini dikaitkan dengan peringkat input pembangunan, dapat dijelaskan bahwa

sukses Provinsi DKI Jakarta dalam meraih tingkat hidup di peringkat pertama karena memang didukung oleh potensi input pembangunan yang juga berada di peringkat pertama. Meskipun DKI Jakarta kurang didukung dimensi sumber daya alam yang berada di peringkat terakhir “33”, tetapi untuk 4 dimensi lainnya DKI Jakarta berada di peringkat pertama (Grafik 4.8).

**Grafik 4.8.**  
**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP DKI Jakarta**  
**Menurut Dimensi Tahun 2009**



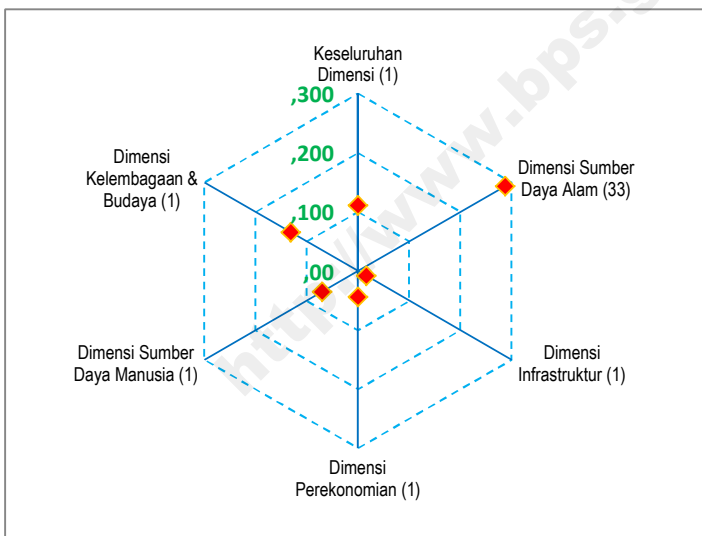
Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan
- Kode 1 s.d. 33 di belakang nama dimensi menunjukkan peringkat

Begitu juga dengan sukses Provinsi DI Yogyakarta dalam meraih tingkat hidup, ternyata juga tidak terlepas dari potensi input pembangunan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB per kapita Provinsi DI Yogyakarta secara nominal nilainya tidak begitu besar “berada di peringkat 25”, akan tetapi secara keseluruhan potensi input pembangunannya memang boleh dibilang sangat memadai atau dapat diandalkan.

Jika sukses meraih tingkat hidup telusuri lebih jauh melalui dimensi input pembangunan hasilnya seperti pada Gambar 4.9. Dari gambar ini terlihat bahwa sukses DI Yogyakarta meraih sukses tingkat hidup karena adanya dukungan yang kuat dari dimensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang masing-masing berada di peringkat 2 dan 3. Meskipun DI Yogyakarta kurang didukung oleh potensi sumber daya alam yang hanya di peringkat 32, dukungan yang tidak kalah besar juga berasal dari dimensi perekonomian serta kelembagaan dan budaya yang masing berada di peringkat 6 dan 7.

**Grafik 4.9.**  
**Ukuran Pembangunan dan Peringkat IDIP DI Yogyakarta**  
**Menurut Dimensi Tahun 2009**



Keterangan :

- : Nilai ukuran pembangunan
- Kode 1 s.d. 33 di belakang nama dimensi menunjukkan peringkat

Selain itu berdasarkan peringkat tingkat hidup dan peringkat input pembangunan, diketahui bahwa peringkat tingkat hidup dan input pembangunan keseluruhan dimensi dari Provinsi

Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur ternyata posisinya tidak berbeda jauh (peringkatnya sama-sama atas 30), ini menunjukkan bahwa kesenjangan tingkat hidup yang terjadi di kedua provinsi ini memang karena kurangnya dukungan dari potensi input pembangunannya. Sedikit berbeda terjadi pada beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Pada beberapa provinsi ini peringkat tingkat hidupnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan peringkat input pembangunan, ini menunjukkan bahwa meskipun provinsi-provinsi kurang didukung input pembangunan tetapi provinsi-provinsi ini mampu mengoptimalkan potensi input pembangunannya untuk meraih sukses tingkat hidup masyarakatnya. Sedangkan beberapa provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, peringkat input pembangunan provinsi-provinsi ini jauh lebih baik jika dibandingkan peringkat tingkat hidupnya. Realita itu menunjukkan bahwa beberapa provinsi yang disebutkan terakhir tersebut boleh dibilang kurang mampu memanfaatkan potensi input pembangunannya untuk meraih sukses tingkat hidup yang lebih baik.

# BAB 5

## PENUTUP

<http://www.bps.go.id>





- Angka harapan hidup ( $e_0$ ) dan persen balita kelahiran terakhir ditolong oleh tenaga medis secara komposit dapat digunakan untuk mengukur IDTHAP dimensi kesehatan dan gizi dengan tingkat reliabilitas sebesar 80 persen.

Propinsi dengan peringkat IDTHAP Kesehatan dan Gizi terbaik adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali, sementara propinsi dengan peringkat IDTHAP Kesehatan dan Gizi terburuk adalah propinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Sulawesi Barat.

- Rata-rata lama sekolah, persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan Diploma ke atas, Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun dan Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun secara komposit dapat digunakan untuk mengukur IDTHAP dimensi pendidikan dengan tingkat reliabilitas sebesar 83 persen.

Propinsi dengan peringkat IDTHAP Pendidikan terbaik adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, sementara propinsi dengan peringkat IDTHAP Pendidikan terburuk adalah propinsi.

- Persen penduduk di atas garis kemiskinan, persen pengeluaran non makanan dan rata-rata upah buruh/karyawan secara komposit dapat digunakan untuk mengukur IDTHAP dimensi ekonomi dengan tingkat reliabilitas sebesar 69 persen.

DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau tercatat sebagai propinsi dengan peringkat IDTHAP Ekonomi terbaik, sementara propinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Maluku tercatat sebagai propinsi dengan peringkat IDTHAP Ekonomi terburuk.



- Rata-rata jam kerja buruh/karyawan, persen pekerja di sektor formal dan persen pekerja di sektor non pertanian secara komposit dapat digunakan untuk mengukur IDTHAP dimensi ketenagakerjaan dengan tingkat reliabilitas sebesar 87 persen.

DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Banten tercatat sebagai propinsi dengan peringkat IDTHAP Ketenagakerjaan terbaik, sementara peringkat terburuk dipegang oleh propinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua.

- Persen penduduk menonton televisi, persen penduduk membaca surat kabar/majalah dan persen penduduk melakukan Olah Raga seminggu yang lalu secara komposit dapat digunakan untuk mengukur IDTHAP dimensi sosial budaya dengan tingkat reliabilitas sebesar 71 persen.

Propinsi dengan peringkat IDTHAP Sosial Budaya terbaik adalah propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, sementara peringkat terburuk ditempati oleh propinsi Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

- Persen rumah tangga pengguna listrik, persen rumah tangga dengan akses air bersih, persen rumah tangga dengan lantai non tanah, persen rumah tangga dengan fasilitas buang air besar, persen rumah tangga dengan fasilitas tangki septik, persen rumah tangga dengan luas lantai perkapita  $> 8 \text{ m}^2$  dan persen rumah tangga dengan dinding tembok secara komposit dapat digunakan untuk mengukur IDTHAP dimensi perumahan dan lingkungan dengan tingkat reliabilitas sebesar 81 persen.

DKI Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau tercatat sebagai propinsi dengan peringkat IDTHAP Perumahan dan Lingkungan terbaik, sementara peringkat terburuk ditempati oleh propinsi Nusa Tenggara Timur, Papua dan Kalimantan Tengah.

- Persen rumah tangga yang mempunyai telepon selular, persen rumah tangga yang mempunyai komputer dan persen rumah tangga yang mengakses internet, secara komposit dapat digunakan untuk mengukur IDTHAP dimensi teknologi dan informasi dengan tingkat reliabilitas sebesar 95 persen.

Propinsi dengan peringkat IDTHAP Teknologi dan Informasi terbaik adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, sementara peringkat terburuk ditempati oleh propinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

- IDTHAP Keseluruhan Dimensi diukur dengan menggunakan 25 variabel, dengan tingkat reliabilitas sebesar 95 persen.

DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur tercatat sebagai propinsi dengan peringkat terbaik IDTHAP Keseluruhan Dimensi, sementara peringkat terburuk ditempati oleh propinsi Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Barat.

- Posisi ideal suatu propinsi adalah jika propinsi tersebut mampu mengoptimalkan potensi perekonomiannya untuk mewujudkan tingkat hidup yang maksimal atau paling tidak tingkat hidup penduduk seirama dengan potensi perekonomian yang dimilikinya.

DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Tengah, Bengkulu, Jambi dan Maluku Utara tercatat sebagai propinsi yang efektif dalam penggunaan PDRB untuk mewujudkan kesejahteraan penduduknya, sementara propinsi yang kurang efektif dalam penggunaan PDRB untuk mewujudkan kesejahteraan penduduknya adalah propinsi Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.

- IDTHAP peringkat terburuk secara umum ditempati oleh propinsi-propinsi yang kurang mempunyai dukungan perekonomian (kecuali propinsi Papua). Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo tercatat sebagai propinsi yang memiliki peringkat IDTHAP terburuk dan peringkat PDRB perkapita yang juga buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. (2006). *Metodologi Penelitian Ekonomi, Metode Taksonomik*, UI-Press, 2006 : 185-195.
- Anonim, (2005). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009*. CV. Eko Jaya. Jakarta.
- Bappenas, (2006). *Pola Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antar Daerah*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, (2007). *Statistik Sosial Budaya, Hasil Susenas 2006*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2008). *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007, Buku 1*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2008). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2008). *Keadaan Pekerja di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, (2008). *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Berdasarkan Hasil Susenas Panel Maret 2008, Buku 2*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2008). *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Berdasarkan Hasil Susenas Panel Maret 2008, Buku 3*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2009). *Indeks Pembangunan Manusia 2007 - 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik, (2009). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, (2009). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2004-2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

World Bank Institute dan BPS, (2002). Dasar-dasar Analisis Kemiskinan, Buku Panduan Basic Poverty Measurement and Diagnostics Course. Jakarta.

<http://www.bps.go.id>

## A. VARIABEL DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN

Nama Var	Variabel
x101	Luas Wilayah per kapita
x102	Luas Lahan Sawah per kapita
x103	Luas areal tanaman perkebunan per kapita
x104	Luas kawasan hutan per kapita
x105	Persentase desa yang mengalami bencana tanah longsor dalam 3 tahun terakhir
x106	Persentase desa yang mengalami bencana banjir dalam 3 tahun terakhir
x107	Persentase desa yang mengalami bencana gempa bumi dalam 3 tahun terakhir
x108	Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran air
x109	Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran tanah
x110	Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran udara
x111	Persentase desa yang tidak mengalami pencemaran suara/bising
x201	Jumlah RS per kabupaten
x202	Jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan
x203	Jumlah puskesmas/ puskesmas pembantu per kecamatan
x204	Jumlah Bank umum per kabupaten
x205	Persentase desa menurut ketersediaan mini market
x206	Persentase desa menurut ketersediaan restoran/ rumah makan
x207	Persentase desa menurut ketersediaan hotel
x208	Persentase desa menurut ketersediaan Kelompok Pertokoan
x209	Persentase desa menurut ketersediaan Pasar dengan Bangunan Permanen
x210	Persentase desa menurut ketersediaan Kios Sarana Produksi Pertanian
x211	Persentase desa menurut ketersediaan wartel
x212	Persentase desa menurut ketersediaan warnet
x213	Persentase desa menurut ketersediaan kantor Pos/ Kantor Pos Pembantu
x214	Persentase desa menurut ketersediaan Pos Keliling
x215	Persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat
x216	Jumlah kendaraan bermotor per desa
x217	Persentase desa/kelurahan yang jenis permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/ diperkeras
x218	Persentase desa yang ketersediaan jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun

**A. VARIABEL DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN***(lanjutan)*

<b>Nama Var</b>	<b>Variabel</b>
x219	Persentase desa yang dilalui sungai untuk transportasi
x220	Jumlah SD/ sederajat per desa/ kelurahan
x221	Jumlah SMP/ sederajat per kecamatan
x222	Jumlah SMA/ sederajat per kabupaten/ kota
x223	Jumlah Perguruan Tinggi
x224	Persentase desa yang tersedia lapangan sepak bola
x225	Persentase desa yang tersedia lapangan bola voli
x226	Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis
x227	Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskop
x301	PDRB Nominal per kapita
x302	Total investasi per kabupaten
x303	Total kredit perbankan per kabupaten
x304	Total nilai ekspor daerah per kabupaten
x305	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
x306	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Usaha Kecil (KUK)
x307	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
x308	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Lainnya
x309	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Unit Desa
x310	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Industri Kecil & Kerajinan Rakyat
x311	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Simpan Pinjam
x312	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Non KUD
x402	Persentase penduduk usia kerja " 15 tahun ke atas"
x403	Persentase angkatan kerja
x404	Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki kurang dari SMA/ Kejuruan
x405	Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki SMA/ Kejuruan
x406	Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki terendah Diploma I
x407	Persentase penduduk bekerja di sektor pertanian
x408	Persentase penduduk bekerja di sektor manufaktur
x409	Persentase penduduk bekerja di sektor jasa

**A. VARIABEL DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN***(lanjutan)*

<b>Nama Var</b>	<b>Variabel</b>
x410	Persentase penduduk miskin
x411	Jumlah dokter per desa
x412	Jumlah tenaga medis selain dokter per desa
x413	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG
x414	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi DPT
x415	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Polio
x416	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Campak/ Morbili
x417	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Hepatitis B
x418	Rasio antara jumlah murid dengan guru SD/ sederajat
x419	Rasio antara jumlah murid dengan guru SMP/ sederajat
x420	Rasio antara jumlah murid dengan guru SMA/ sederajat
x421	Rasio antara jumlah mahasiswa dengan dosen
x501	Persentase desa menurut keberadaan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat "LSM"
x502	Persentase desa menurut keberadaan kegiatan yayasan/kelompok/persatuan kematian
x503	Persentase desa yang dapat menerima program TVRI
x504	Persentase desa yang dapat menerima program TV Swasta Nasional
x505	Persentase desa yang dapat menerima program TV Lokal
x506	Persentase desa yang mengalami kejadian perkelahian massal
x507	Persentase desa yang mengalami tindak kejahatan pencurian
x508	Persentase desa yang mengalami tindak kejahatan narkoba
x509	Persentase desa yang mempunyai ketersediaan tempat penampungan sampah sementara





**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBAGUNAN****B.1 DIMENSI SUMBER DAYA ALAM**

Provinsi	x101	x102	x103	x104	x105	x106	x107	x108	x109	x110	x111	x112
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11. Nanggroe Aceh D.	13.28	0.54	0.17	0.81	6.32	4.83	30.99	11.60	53.62	90.74	76.26	79.38
12. Sumatera Utara	5.51	0.33	0.15	0.28	4.35	8.19	11.88	3.41	57.46	95.51	63.33	83.69
13. Sumatera Barat	8.70	0.24	0.17	0.54	4.28	20.30	24.06	62.77	56.73	86.94	75.51	80.82
14. Riau	16.40	0.25	0.47	1.63	36.75	1.47	29.26	0.12	66.08	96.64	51.84	85.44
15. Jambi	17.66	0.26	0.42	0.77	6.75	3.72	29.32	18.23	47.29	93.41	72.09	87.21
16. Sumatera Selatan	12.68	0.90	0.24	0.52	7.30	4.31	10.40	0.98	51.20	92.78	71.48	84.54
17. Bengkulu	11.95	0.13	0.26	0.55	4.01	6.09	10.04	53.74	58.86	95.65	65.89	79.60
18. Lampung	4.62	0.20	0.09	0.13	4.83	2.41	10.44	0.62	63.99	97.64	56.92	81.45
19. Kep. Bangka Belitung	14.43	0.01	0.17	0.58	7.52	0.28	5.56	0.56	35.42	77.50	93.75	93.33
21. Kep Riau	5.41	0.00	0.05	0.54	5.80	2.83	9.35	0.00	55.74	95.08	67.21	81.97
31. DKI Jakarta	0.07	0.00	0.00	0.01	0.42	0.37	66.67	0.00	52.67	97.71	81.68	67.94
32. Jawa Barat	0.85	0.10	0.01	0.02	2.20	27.39	19.77	1.16	62.97	94.78	66.12	76.13
33. Jawa Tengah	1.00	0.12	0.01	0.02	2.48	14.63	15.94	10.56	65.72	95.15	60.91	78.22
36. Banten	0.99	0.02	0.02	0.03	1.16	8.27	34.85	0.98	65.84	94.90	66.31	72.95
51. Bali	1.63	0.02	0.03	0.04	3.06	14.71	4.62	3.78	56.06	95.96	72.73	75.25
52. Nusa Tenggara Barat	4.19	0.12	0.03	0.23	4.94	3.05	21.65	19.91	59.93	96.58	67.81	75.68

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBAGUNAN****B.1. DIMENSI SUMBER DAYA ALAM***(lanjutan)*

Provinsi	x101	x102	x103	x104	x105	x106	x107	x108	x109	x110	x111	x112
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53. Nusa Tenggara Timur	10.55	0.16	0.06	0.39	2.14	21.90	21.58	0.74	73.31	96.99	59.77	69.92
61. Kalimantan Barat	34.11	1.25	0.24	2.13	3.41	1.85	20.80	0.00	42.55	86.17	83.64	87.63
62. Kalimantan Tengah	73.62	1.45	0.45	7.34	6.20	0.66	29.87	0.00	38.46	94.74	76.92	89.88
63. Kalimantan Selatan	11.08	0.66	0.15	0.53	6.35	2.02	26.91	0.00	54.29	92.14	71.62	81.95
64. Kalimantan Timur	64.63	0.68	0.17	4.63	47.03	7.87	33.31	0.00	51.38	92.91	78.15	77.56
71. Sulawesi Utara	6.21	0.05	0.13	0.40	3.33	18.34	22.70	11.26	59.60	93.70	75.07	71.63
72. Sulawesi Tengah	24.93	0.40	0.19	1.77	5.88	10.01	32.79	2.25	57.65	90.20	77.65	74.51
73. Sulawesi Selatan	5.91	0.42	0.06	0.36	4.23	12.29	27.05	0.54	66.57	95.93	68.12	69.38
74. Sulawesi Tenggara	17.97	0.20	0.18	1.23	4.76	2.64	13.22	0.72	60.87	89.44	68.94	80.75
75. Gorontalo	11.44	0.04	0.09	0.74	2.21	8.72	44.59	1.94	40.66	98.90	76.92	83.52
76. Sulawesi Barat	16.02	0.11	0.35	0.98	4.07	26.37	30.02	5.97	62.11	97.89	69.47	70.53
81. Maluku	35.02	0.05	0.08	3.23	1.78	5.30	13.13	6.62	51.13	98.31	89.83	60.73
82. Maluku Utara	32.80	0.06	0.27	3.02	2.04	3.20	12.43	12.05	60.31	89.69	85.05	64.95
91. Papua Barat	130.43	0.15	0.09	13.24	7.39	1.32	3.66	2.19	42.68	90.24	78.05	89.02
94. Papua	152.10	0.56	0.04	15.44	23.16	8.17	10.19	1.07	43.57	92.14	88.57	75.71

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.2. DIMENSI INFRASTRUKTUR**

Provinsi	X <sub>201</sub>	X <sub>202</sub>	X <sub>203</sub>	X <sub>204</sub>	X <sub>205</sub>	X <sub>206</sub>	X <sub>207</sub>	X <sub>208</sub>	X <sub>209</sub>	X <sub>210</sub>	X <sub>211</sub>	X <sub>212</sub>	X <sub>213</sub>	X <sub>214</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11. NAD	1,72	0,62	4,16	2,83	2,07	6,30	0,83	8,47	7,46	13,03	3,41	1,26	1,88	7,81
12. SUMUT	5,13	2,11	5,68	4,88	3,75	16,35	2,72	7,84	10,82	21,28	18,99	4,02	4,11	11,64
13. SUMBAR	2,42	0,50	4,90	3,74	17,21	55,19	6,93	26,95	37,88	61,26	58,12	16,67	13,96	32,36
14. RIAU	2,89	1,45	6,53	6,33	7,98	27,99	4,18	19,51	28,74	32,42	14,55	5,49	5,18	10,23
15. JAMBI	1,78	0,39	5,88	4,00	5,91	23,87	3,84	16,19	17,42	29,62	10,13	3,20	4,25	4,02
16. SUMSEL	2,55	0,64	5,54	4,47	3,99	13,12	2,66	9,74	15,07	22,60	12,46	3,25	4,42	19,32
17. BENGKULU	1,11	0,30	5,57	2,10	3,03	13,99	3,33	6,81	11,18	18,87	9,77	2,96	4,00	13,99
18. LAMPUNG	2,11	1,24	5,10	3,21	7,70	15,56	3,16	15,09	22,10	34,54	26,34	3,63	4,70	13,55
19. BABEL	1,00	0,60	5,30	2,86	6,98	47,97	5,81	16,28	11,92	19,77	21,93	6,43	5,26	13,45
21. KEPRI	2,40	0,85	4,32	7,00	24,54	32,21	14,11	27,30	17,48	11,04	27,92	17,38	10,83	4,84
31. DKI	77,00	5,45	5,48	84,33	91,76	92,13	37,83	80,90	64,42	3,00	99,63	94,01	64,42	42,70
32. JABAR	6,12	2,34	4,25	12,96	18,67	29,65	4,94	19,95	14,32	51,47	66,75	12,81	7,94	19,81
33. JATENG	4,59	2,25	4,79	7,74	9,70	13,10	4,19	18,59	22,37	40,25	58,78	6,81	6,12	20,49
34. DIY	4,25	1,53	5,51	10,20	33,79	34,93	12,33	41,55	56,16	67,58	83,11	24,66	19,86	25,11
35. JATIM	4,76	1,08	4,85	9,61	11,75	13,94	3,96	19,76	23,81	54,67	66,83	8,82	6,13	15,67
36. BANTEN	4,25	2,77	2,95	8,25	22,34	22,14	4,06	22,01	13,90	30,19	44,22	13,90	6,65	16,89
51. BALI	3,50	0,63	9,93	8,00	26,69	32,87	18,26	21,91	50,28	59,55	50,50	14,71	10,18	7,36

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.2. DIMENSI INFRASTRUKTUR***(lanjutan)*

Provinsi	X201	X202	X203	X204	X205	X206	X207	X208	X209	X210	X211	X212	X213	X214
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
52. NTB	1,25	0,22	5,49	3,50	6,68	20,15	6,24	12,49	24,42	66,70	17,63	4,93	8,32	16,65
53. NTT	1,32	0,36	4,33	2,05	1,00	3,67	3,07	3,21	12,81	7,14	4,14	1,71	2,67	2,85
61. KALBAR	1,92	0,39	5,65	4,43	5,30	12,17	2,68	14,80	11,45	13,85	8,04	2,23	5,64	3,85
62. KALTENG	1,15	0,53	8,25	2,57	2,35	7,18	2,90	6,91	14,85	13,74	6,86	1,44	4,60	3,16
63. KALSEL	1,82	0,50	5,41	4,85	4,05	9,37	3,29	6,33	16,36	20,72	11,41	3,28	4,85	16,71
64. KALSEL	2,80	0,63	6,49	7,00	7,55	13,13	6,21	9,03	13,13	22,37	18,23	6,83	6,62	7,88
71. SULUT	1,91	0,39	3,91	3,47	5,62	11,45	4,48	7,03	10,91	15,06	29,10	3,41	4,41	14,92
72. SULTENG	1,40	0,16	5,70	2,91	2,43	9,61	2,14	3,08	22,66	17,73	11,26	1,72	3,61	5,92
73. SULSEL	2,24	0,39	5,50	4,63	4,62	10,01	3,63	11,10	23,15	30,96	27,63	4,14	3,94	11,07
74. SULTRA	1,30	0,09	3,71	2,08	1,73	4,68	2,56	2,51	17,46	12,08	10,29	1,38	2,86	4,58
75. GORONTALO	0,60	0,43	4,68	2,00	2,40	14,73	2,57	3,60	21,06	17,29	19,18	1,37	3,08	8,90
76. SULBAR	0,20	0,18	5,18	2,20	1,68	7,65	1,49	7,09	21,83	27,80	10,15	0,92	2,58	3,51
81. MALUKU	1,89	0,43	7,63	2,27	2,87	6,51	2,54	4,86	7,40	10,93	15,56	1,43	4,42	4,19
82. MALUT	1,33	0,08	2,67	1,44	2,70	6,27	1,35	2,61	7,43	7,92	10,62	1,06	2,22	4,25
91. PABAR	1,25	0,27	3,43	1,73	1,49	2,32	2,16	1,41	4,90	6,97	4,66	1,21	1,53	2,89
94. PAPUA	0,62	0,67	2,43	1,41	1,39	2,30	1,24	1,81	5,26	7,34	4,16	0,97	1,23	1,61

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.2. DIMENSI INFRASTRUKTUR***(lanjutan)*

Provinsi	x215	x216	x217	x218	x219	x220	x221	x222	x223	x224	x225	x226	x227
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
11. NAD	1,72	0,62	4,16	2,83	2,07	6,30	0,83	8,47	7,46	13,03	3,41	1,26	1,88
12. SUMUT	5,13	2,11	5,68	4,88	3,75	16,35	2,72	7,84	10,82	21,28	18,99	4,02	4,11
13. SUMBAR	2,42	0,50	4,90	3,74	17,21	55,19	6,93	26,95	37,88	61,26	58,12	16,67	13,96
14. RIAU	2,89	1,45	6,53	6,33	7,98	27,99	4,18	19,51	28,74	32,42	14,55	5,49	5,18
15. JAMBI	1,78	0,39	5,88	4,00	5,91	23,87	3,84	16,19	17,42	29,62	10,13	3,20	4,25
16. SUMSEL	2,55	0,64	5,54	4,47	3,99	13,12	2,66	9,74	15,07	22,60	12,46	3,25	4,42
17. BENGKULU	1,11	0,30	5,57	2,10	3,03	13,99	3,33	6,81	11,18	18,87	9,77	2,96	4,00
18. LAMPUNG	2,11	1,24	5,10	3,21	7,70	15,56	3,16	15,09	22,10	34,54	26,34	3,63	4,70
19. BABEL	1,00	0,60	5,30	2,86	6,98	47,97	5,81	16,28	11,92	19,77	21,93	6,43	5,26
21. KEPRI	2,40	0,85	4,32	7,00	24,54	32,21	14,11	27,30	17,48	11,04	27,92	17,38	10,83
31. DKI	77,00	5,45	5,48	84,33	91,76	92,13	37,83	80,90	64,42	3,00	99,63	94,01	64,42
32. JABAR	6,12	2,34	4,25	12,96	18,67	29,65	4,94	19,95	14,32	51,47	66,75	12,81	7,94
33. JATENG	4,59	2,25	4,79	7,74	9,70	13,10	4,19	18,59	22,37	40,25	58,78	6,81	6,12
34. DIY	4,25	1,53	5,51	10,20	33,79	34,93	12,33	41,55	56,16	67,58	83,11	24,66	19,86
35. JATIM	4,76	1,08	4,85	9,61	11,75	13,94	3,96	19,76	23,81	54,67	66,83	8,82	6,13
36. BANTEN	4,25	2,77	2,95	8,25	22,34	22,14	4,06	22,01	13,90	30,19	44,22	13,90	6,65
51. BALI	3,50	0,63	9,93	8,00	26,69	32,87	18,26	21,91	50,28	59,55	50,50	14,71	10,18

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.2. DIMENSI INFRASTRUKTUR***(lanjutan)*

Provinsi	x215	x216	x217	x218	x219	x220	x221	x222	x223	x224	x225	x226	x227
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
52. NTB	1,25	0,22	5,49	3,50	6,68	20,15	6,24	12,49	24,42	66,70	17,63	4,93	8,32
53. NTT	1,32	0,36	4,33	2,05	1,00	3,67	3,07	3,21	12,81	7,14	4,14	1,71	2,67
61. KALBAR	1,92	0,39	5,65	4,43	5,30	12,17	2,68	14,80	11,45	13,85	8,04	2,23	5,64
62. KALTENG	1,15	0,53	8,25	2,57	2,35	7,18	2,90	6,91	14,85	13,74	6,86	1,44	4,60
63. KALSEL	1,82	0,50	5,41	4,85	4,05	9,37	3,29	6,33	16,36	20,72	11,41	3,28	4,85
64. KALSEL	2,80	0,63	6,49	7,00	7,55	13,13	6,21	9,03	13,13	22,37	18,23	6,83	6,62
71. SULUT	1,91	0,39	3,91	3,47	5,62	11,45	4,48	7,03	10,91	15,06	29,10	3,41	4,41
72. SULTENG	1,40	0,16	5,70	2,91	2,43	9,61	2,14	3,08	22,66	17,73	11,26	1,72	3,61
73. SULSEL	2,24	0,39	5,50	4,63	4,62	10,01	3,63	11,10	23,15	30,96	27,63	4,14	3,94
74. SULTRA	1,30	0,09	3,71	2,08	1,73	4,68	2,56	2,51	17,46	12,08	10,29	1,38	2,86
75. GORONTALO	0,60	0,43	4,68	2,00	2,40	14,73	2,57	3,60	21,06	17,29	19,18	1,37	3,08
76. SULBAR	0,20	0,18	5,18	2,20	1,68	7,65	1,49	7,09	21,83	27,80	10,15	0,92	2,58
81. MALUKU	1,89	0,43	7,63	2,27	2,87	6,51	2,54	4,86	7,40	10,93	15,56	1,43	4,42
82. MALUT	1,33	0,08	2,67	1,44	2,70	6,27	1,35	2,61	7,43	7,92	10,62	1,06	2,22
91. PABAR	1,25	0,27	3,43	1,73	1,49	2,32	2,16	1,41	4,90	6,97	4,66	1,21	1,53
94. PAPUA	0,62	0,67	2,43	1,41	1,39	2,30	1,24	1,81	5,26	7,34	4,16	0,97	1,23

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBAGUNAN****B.3 DIMENSI PEREKONOMIAN**

Provinsi	x301	x302	x303	x304	x305	x306	x307	x308	x309	x310	x311	x312
(1)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)
11. Nanggroe Aceh D.	9.89	3,628.70	136.13	98,710.60	1.26	12.31	1.51	14.46	5.92	1.11	12.08	5.60
12. Sumatera Utara	13.49	102,238.79	175.64	285,101.18	1.51	13.06	2.64	15.10	5.84	0.64	12.87	9.49
13. Sumatera Barat	11.52	24,256.84	192.01	127,213.66	10.06	40.48	14.50	35.06	27.71	2.60	46.54	22.62
14. Riau	23.47	479,253.33	411.40	1,297,427.82	4.30	21.51	7.86	32.98	30.49	1.68	27.00	15.02
15. Jambi	8.36	54,054.55	316.62	109,955.78	1.46	14.35	9.29	15.89	26.02	1.23	19.03	9.06
16. Sumatera Selatan	11.61	74,281.33	124.38	234,731.68	1.92	9.68	5.46	30.69	13.61	0.71	13.28	6.01
17. Bengkulu	5.31	1,034.00	304.59	16,936.49	6.07	9.77	3.40	22.13	6.88	1.11	19.25	8.44
18. Lampung	6.96	61,234.29	182.51	198,648.49	8.94	17.23	3.29	10.73	5.52	0.90	19.15	7.40
19. Kep. Bangka Belitung	12.35	65,694.29	344.51	294,893.19	4.65	29.07	7.56	50.87	12.21	0.29	15.41	12.79
21. Kep Riau	36.36	344,082.86	2,282.41	1,112,909.72	0.31	25.15	14.11	31.90	13.19	1.84	38.04	18.10
31. DKI Jakarta	81.66	10,249,220.00	13,328.58	6,065,535.51	2.25	28.84	38.58	44.57	4.12	3.37	61.80	34.46
32. Jawa Barat	13.51	881,086.92	115.46	38,623.49	8.96	39.87	15.33	46.98	9.44	1.99	32.02	16.49
33. Jawa Tengah	9.48	97,821.14	81.23	94,895.02	9.76	39.41	11.87	48.45	7.83	1.55	30.72	13.30
34. DI Yogyakarta	9.93	21,808.00	707.63	736.44	32.88	57.31	25.34	48.86	16.89	2.74	52.05	18.04
35. Jawa Timur	14.94	217,327.37	96.17	307,987.01	12.51	35.81	11.99	42.08	8.31	1.49	35.26	10.85
36. Banten	12.44	2,206,812.50	430.69	92,316.09	3.19	33.11	20.21	42.02	4.72	1.00	17.89	10.51
51. Bali	13.16	242,942.22	685.91	30,018.86	29.63	52.11	22.19	73.60	14.75	2.95	65.73	16.15



**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBAGUNAN****B.3. DIMENSI PEREKONOMIAN***(lanjutan)*

Provinsi	x301	x302	x303	x304	x305	x306	x307	x308	x309	x310	x311	x312
(1)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)
52. Nusa Tenggara Barat	4.48	2,726.00	185.43	75,339.73	16.65	36.14	8.98	54.55	15.12	2.52	40.42	21.47
53. Nusa Tenggara Timur	3.09	1,790.48	71.25	608.69	4.82	19.27	1.21	17.20	3.78	0.75	17.45	5.42
61. Kalimantan Barat	9.06	55,601.43	207.74	65,219.04	2.51	10.16	5.47	34.34	14.68	0.73	13.62	12.79
62. Kalimantan Tengah	11.16	107,875.71	199.46	22,493.00	3.52	10.36	3.18	15.81	17.33	0.55	13.95	9.53
63. Kalimantan Selatan	8.29	191,216.92	330.05	274,609.33	10.59	20.31	8.51	37.28	12.21	0.30	13.37	7.95
64. Kalimantan Timur	41.89	59,518.57	604.24	1,833,310.05	4.45	24.84	3.60	18.42	22.09	1.13	25.76	17.64
71. Sulawesi Utara	11.05	39,458.67	331.46	43,597.16	7.03	25.03	8.84	24.50	8.77	0.80	20.28	11.65
72. Sulawesi Tengah	7.05	2,820.00	283.57	30,039.24	3.86	21.29	4.33	29.12	8.54	0.24	14.53	10.20
73. Sulawesi Selatan	8.40	77,566.67	182.15	88,982.12	8.93	29.36	15.21	43.45	11.64	0.68	19.42	13.48
74. Sulawesi Tenggara	7.35	2,820.00	77.07	48,791.15	2.61	11.59	2.07	17.41	7.79	0.69	18.00	6.66
75. Gorontalo	4.99	0.00	828.19	4,090.72	4.79	26.71	3.77	27.91	5.31	0.00	31.51	7.19
76. Sulawesi Barat	4.21	0.00	519.04	5,191.52	7.09	25.56	3.92	16.23	11.57	0.75	15.30	9.51
81. Maluku	3.49	0.00	217.52	12,541.42	1.66	8.72	1.21	5.52	13.47	0.44	10.04	8.17
82. Maluku Utara	2.77	6,162.22	196.96	42,027.90	1.54	11.00	0.87	12.07	13.13	0.68	10.91	4.44
91. Papua Barat	12.17	854.55	306.35	40,208.94	0.25	3.65	0.91	2.41	6.14	0.83	2.99	2.74
94. Papua	8.62	1,997.24	111.91	91,192.35	1.18	3.08	0.57	2.11	4.02	0.76	2.20	3.05

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.4. DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Provinsi	x401	x402	x403	x404	x405	x406	x407	x408	x409
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11. NAD	0,68	69,59	43,50	48,05	22,71	1,44	3,48	0,76	6,41
12. SUMUT	2,31	68,75	47,54	46,58	25,04	0,68	4,50	2,50	4,14
13. SUMBAR	4,78	70,08	44,99	41,62	23,27	1,10	4,51	1,06	4,79
14. RIAU	3,24	68,63	42,61	46,21	23,94	1,12	5,50	1,42	4,57
15. JAMBI	2,07	70,65	47,09	47,54	18,72	1,12	5,48	0,78	5,21
16. SUMSEL	2,29	70,14	47,91	48,74	18,81	1,82	4,20	0,91	3,83
17. BENGKULU	1,15	70,91	49,76	45,98	21,02	0,89	3,66	0,40	5,27
18. LAMPUNG	3,12	71,44	48,41	53,19	17,83	0,43	4,36	1,97	3,30
19. BABEL	3,16	72,85	47,40	44,56	18,50	0,94	3,90	0,82	5,34
21. KEPRI	4,29	69,67	44,99	43,84	27,66	0,73	1,61	8,79	6,67
31. DKI	34,54	76,32	50,83	42,58	34,37	0,73	0,08	6,11	9,08
32. JABAR	7,06	72,73	45,74	52,08	18,38	0,70	3,96	5,22	4,81
33. JATENG	3,83	75,06	51,99	51,83	15,24	0,69	4,11	4,48	4,33
34. DIY	8,00	82,00	57,59	41,48	27,20	0,80	2,15	3,38	8,05
35. JATIM	4,38	78,77	54,55	48,68	17,24	0,59	5,41	3,77	4,73
36. BANTEN	6,37	69,88	44,54	47,84	20,73	0,64	2,33	7,38	4,00
51. BALI	4,97	76,84	59,80	40,67	23,75	2,21	2,67	3,05	6,60

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.4. DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA***(lanjutan)*

Provinsi	x401	x402	x403	x404	x405	x406	x407	x408	x409
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
52. NTB	4,82	68,94	47,33	41,61	15,23	0,73	5,58	2,06	4,87
53. NTT	1,63	67,57	48,71	43,40	13,00	0,66	0,90	0,19	4,10
61. KALBAR	2,28	69,38	50,96	42,26	12,70	0,68	3,03	0,88	4,35
62. KALTENG	1,38	70,51	50,22	53,37	17,00	0,90	4,27	0,61	4,91
63. KALSEL	1,76	72,76	52,11	47,49	17,58	0,87	4,02	1,64	5,53
64. KALSEL	2,21	71,67	46,16	45,79	26,46	0,90	2,90	1,63	6,08
71. SULUT	1,35	76,01	47,16	46,37	25,73	0,72	3,49	1,28	6,26
72. SULTENG	1,39	70,76	49,02	51,26	18,12	1,13	3,05	0,43	5,62
73. SULSEL	2,67	71,58	44,72	42,84	18,08	0,82	2,82	1,35	3,80
74. SULTRA	1,01	66,95	47,12	43,61	20,08	1,17	1,51	0,52	6,03
75. GORONTALO	1,59	71,29	45,46	41,43	16,45	0,91	3,84	1,51	6,54
76. SULBAR	1,74	71,68	48,79	43,72	15,34	1,14	4,24	0,73	4,78
81. MALUKU	1,48	68,00	44,50	48,22	22,18	1,51	0,96	0,44	4,65
82. MALUT	0,92	67,49	43,32	47,77	20,01	1,50	1,84	0,18	5,80
91. PABAR	0,54	69,13	47,37	42,96	20,24	0,80	1,65	0,90	6,47
94. PAPUA	0,59	69,17	530,54	30,52	19,41	0,51	1,42	0,56	4,16

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.4. DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA***(lanjutan)*

Provinsi	x410	x411	x412	x413	x414	x415	x416	x417	x418	x419	x420	x421
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
11. NAD	21,80	0,18	2,21	85,32	83,17	85,50	74,08	77,80	14,27	11,32	11,04	1,03
12. SUMUT	11,50	0,51	3,85	82,63	80,21	84,45	69,27	73,92	21,44	14,48	12,10	1,20
13. SUMBAR	9,54	1,13	7,34	88,73	85,58	85,51	71,92	82,15	15,32	10,81	9,83	1,10
14. RIAU	9,48	0,64	5,84	89,15	86,85	87,52	75,29	82,82	17,95	12,42	11,90	1,04
15. JAMBI	8,77	0,38	5,15	88,70	85,72	86,07	75,50	80,71	19,57	13,27	10,98	1,21
16. SUMSEL	16,28	0,33	4,34	92,87	90,27	89,80	77,18	85,90	14,81	10,90	9,94	1,10
17. BENGKULU	18,59	0,39	3,56	93,65	90,68	90,26	79,57	87,98	17,33	12,94	10,77	1,20
18. LAMPUNG	20,22	0,32	4,82	94,42	91,40	90,79	79,12	88,73	18,88	15,63	13,23	1,18
19. BABEL	7,46	0,58	4,11	90,43	87,85	87,30	76,85	86,32	17,07	12,88	11,43	1,13
21. KEPRI	8,72	1,31	5,59	91,10	88,36	89,80	78,19	84,37	19,46	12,83	9,99	1,28
31. DKI	3,62	13,15	6,45	97,11	94,43	93,63	79,03	91,37	26,03	16,16	12,55	1,29
32. JABAR	11,96	1,04	6,12	93,75	91,11	92,00	79,31	87,01	23,18	15,37	13,84	1,11
33. JATENG	17,72	0,66	4,56	96,87	93,74	94,00	81,36	92,43	23,47	15,60	13,34	1,17
34. DIY	17,23	3,12	7,42	99,21	96,62	97,01	83,61	95,58	17,42	14,98	13,41	1,12
35. JATIM	16,68	0,79	4,40	93,39	90,26	91,15	78,03	87,35	10,79	11,79	9,19	1,28
36. BANTEN	7,64	1,00	6,56	91,58	88,75	90,61	73,49	80,75	14,81	12,49	12,56	0,99
51. BALI	5,13	1,89	4,86	97,88	95,00	95,12	82,96	95,00	18,19	13,11	10,24	1,28

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.4. DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA***(lanjutan)*

Provinsi	x410	x411	x412	x413	x414	x415	x416	x417	x418	x419	x420	x421
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52. NTB	22,78	0,56	7,80	96,56	92,28	92,17	80,94	91,22	15,32	10,28	9,41	1,09
53. NTT	23,31	0,27	5,43	90,67	88,38	88,51	78,76	84,75	19,11	15,28	14,55	1,05
61. KALBAR	9,30	0,27	5,68	84,02	81,04	81,87	71,47	76,90	19,08	15,53	12,32	1,26
62. KALTENG	7,02	0,27	4,58	90,30	88,21	88,91	79,25	83,90	19,31	14,19	10,89	1,30
63. KALSEL	5,12	0,27	3,13	87,36	83,88	84,04	71,46	79,61	13,26	11,97	10,23	1,17
64. KALSEL	7,73	0,59	4,42	95,88	93,08	92,95	82,37	91,35	18,04	13,79	11,87	1,16
71. SULUT	9,79	0,73	3,06	96,78	93,59	92,79	81,15	89,60	14,40	12,67	11,32	1,12
72. SULTENG	18,98	0,25	3,98	86,19	83,39	84,53	72,77	80,01	18,21	11,23	10,74	1,05
73. SULSEL	12,31	0,55	4,80	90,26	87,17	87,32	75,99	84,07	18,00	11,23	10,27	1,09
74. SULTRA	18,93	0,16	3,51	90,01	87,20	87,40	78,62	86,01	16,07	11,55	10,70	1,08
75. GORONTALO	25,01	0,38	3,83	92,95	89,53	89,39	78,46	88,05	13,90	10,45	9,01	1,16
76. SULBAR	15,29	0,32	4,52	78,78	76,44	78,19	69,44	73,57	14,77	10,72	10,08	1,06
81. MALUKU	28,23	0,34	6,45	79,39	77,25	80,30	69,51	73,38	16,74	12,92	11,76	1,10
82. MALUT	10,36	0,24	3,63	81,63	79,41	83,64	73,57	74,97	22,26	12,00	9,30	1,29
91. PABAR	35,71	0,28	2,70	88,56	87,29	87,52	77,29	80,16	22,54	15,83	11,23	1,41
94. PAPUA	37,53	0,16	2,43	72,11	70,30	72,41	62,63	64,53	21,78	11,89	12,68	0,94

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.5. DIMENSI KELEMBAGAAN DAN BUDAYA**

Provinsi	X501	X502	X503	X504	X505	X506	X507	X508	X509
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11. NAD	8,03	54,16	42,01	30,68	11,91	1,00	29,36	9,23	7,63
12. SUMUT	18,81	74,49	45,07	25,39	21,28	2,43	35,06	10,80	5,78
13. SUMBAR	25,15	48,61	65,48	51,84	35,39	3,25	51,08	16,13	22,14
14. RIAU	24,62	77,15	36,28	28,55	26,25	3,49	52,68	12,84	5,10
15. JAMBI	17,14	50,11	52,11	23,71	21,11	4,07	45,13	8,44	3,45
16. SUMSEL	17,72	70,04	64,79	49,17	28,91	0,88	57,00	8,83	4,35
17. BENGKULU	14,13	44,88	45,08	40,41	6,88	1,26	39,97	1,78	7,26
18. LAMPUNG	21,05	66,01	74,05	77,60	11,33	1,58	60,07	5,39	10,18
19. BABEL	19,17	76,39	42,73	72,09	10,47	6,40	52,03	7,85	13,29
21. KEPRI	32,29	65,16	55,21	54,60	51,84	1,84	41,41	8,90	18,10
31. DKI	68,54	58,43	100,00	100,00	98,13	3,00	69,29	33,71	50,00
32. JABAR	20,39	30,09	82,61	89,71	45,12	4,60	75,85	11,16	12,85
33. JATENG	10,86	40,93	92,66	96,47	67,41	3,06	51,11	2,18	13,65
34. DIY	22,83	36,07	94,75	99,32	90,41	2,05	59,59	8,68	5,71
35. JATIM	16,47	61,57	93,59	95,26	79,37	2,07	50,52	5,98	11,96
36. BANTEN	22,41	33,42	94,08	94,02	67,89	4,59	73,60	14,03	11,43
51. BALI	14,29	93,98	94,38	90,03	87,92	1,12	38,62	3,79	24,77

**B. DATA DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****B.5. DIMENSI KELEMBAGAAN DAN BUDAYA***(lanjutan)*

Provinsi	X501	X502	X503	X504	X505	X506	X507	X508	X509
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
52. NTB	35,04	51,36	59,47	31,65	38,66	6,13	67,91	5,70	10,74
53. NTT	13,33	26,94	29,54	8,63	5,64	5,89	27,36	0,32	6,76
61. KALBAR	17,11	39,49	23,79	7,93	7,37	1,06	36,01	3,07	11,05
62. KALTENG	16,49	50,60	23,55	15,95	6,56	0,83	33,91	2,56	2,38
63. KALSEL	12,06	88,29	75,94	72,59	49,44	1,62	47,57	9,57	10,60
64. KALSEL	22,23	46,90	28,02	24,42	10,37	1,62	32,32	7,76	19,73
71. SULUT	19,07	70,52	37,95	30,39	28,05	3,15	44,11	0,33	11,19
72. SULTENG	11,42	34,53	21,59	9,61	0,06	3,32	30,37	2,61	8,61
73. SULSEL	18,44	23,34	47,79	27,02	21,15	2,61	39,38	3,29	11,50
74. SULTRA	8,91	21,99	36,19	19,23	12,38	2,71	23,57	0,39	8,43
75. GORONTALO	22,29	74,80	50,17	13,36	32,36	2,74	30,48	2,05	1,45
76. SULBAR	10,45	13,76	26,31	0,00	0,00	1,49	26,49	0,37	6,87
81. MALUKU	10,38	25,17	22,96	9,71	8,39	12,36	23,07	1,43	5,04
82. MALUT	12,05	44,16	0,19	1,06	0,87	9,46	20,85	1,64	5,16
91. PABAR	8,56	6,66	8,63	2,66	0,91	1,91	9,29	0,17	4,81
94. PAPUA	5,84	10,56	7,01	4,59	2,87	6,95	39,69	0,54	2,27

## C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

### C.1. HASIL UJI VALIDITAS

No	Variabel	Koefisien Korelasi	P-Value	Keterangan
1	x101	-0.79178	0.0000	*
2	x102	-0.39572	0.02336	*
3	x103	-0.52674	0.0019	*
4	x104	-0.7731	0.0000	*
5	x105	-0.3202	0.0697	**
6	x106	0.1527	0.3946	Tidak Signifikan
7	x107	0.0491	0.7855	Tidak Signifikan
8	x108	-0.0984	0.5860	Tidak Signifikan
9	x109	0.2794	0.1153	Tidak Signifikan
10	x110	0.3179	0.0719	**
11	x111	-0.3351	0.0566	**
12	x112	-0.0946	0.5993	Tidak Signifikan
13	x201	0.7126	0.0000	*
14	x202	0.6431	0.0001	*
15	x203	0.2173	0.2237	Tidak Signifikan
16	x204	0.8505	0.0000	*
17	x205	0.8914	0.0000	*
18	x206	0.8392	0.0000	*
19	x207	0.8092	0.0000	*
20	x208	0.9111	0.0000	*
21	x209	0.6912	0.0000	*
22	x210	0.6661	0.0000	*
23	x211	0.8122	0.0000	*
24	x212	0.9007	0.0000	*
25	x213	0.8864	0.0000	*
26	x214	0.6791	0.0000	*
27	x215	0.7975	0.0000	*
28	x216	0.7638	0.0000	*
29	x217	0.6237	0.0002	*
30	x218	0.6197	0.0002	*
31	x219	-0.3832	0.0277	*
32	x220	0.4987	0.0035	*



### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.1. HASIL UJI VALIDITAS

(lanjutan)

No	Variabel	Koefisien Korelasi	P-Value	Keterangan
33	x221	0.4632	0.0072	*
34	x222	0.3994	0.0220	*
35	x223	0.5980	0.0002	*
36	x224	0.4619	0.0073	*
37	x225	0.4806	0.0051	
38	x226	0.7828	0.0000	*
39	x227	0.8068	0.0000	*
40	x301	0.5080	0.0029	*
41	x302	0.6590	0.0000	*
42	x303	0.2363	0.1849	Tidak Signifikan
43	x304	0.3399	0.0535	**
44	x305	0.5087	0.0028	*
45	x306	0.7938	0.0000	*
46	x307	0.8533	0.0000	*
47	x308	0.7925	0.0000	*
48	x309	0.2430	0.1725	Tidak Signifikan
49	x310	0.6123	0.0002	*
50	x311	0.7396	0.0000	*
51	x312	0.7961	0.0000	*
52	x402	0.4576	0.0080	*
53	x403	0.0983	0.5851	Tidak Signifikan
54	x404	-0.0869	0.6294	Tidak Signifikan
55	x405	0.1330	0.4590	Tidak Signifikan
56	x406	-0.2651	0.1360	Tidak Signifikan
57	x407	0.2296	0.1979	Tidak Signifikan
58	x408	0.8041	0.0000	*
59	x409	-0.0752	0.6765	Tidak Signifikan
60	x410	-0.4442	0.0102	*
61	x411	0.8342	0.0000	*
62	x412	0.7684	0.0000	*

### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.1. HASIL UJI VALIDITAS

(lanjutan)

No	Variabel	Koefisien Korelasi	P-Value	Keterangan
63	x413	0.5826	0.0005	*
64	x414	0.5318	0.0017	*
65	x415	0.5618	0.0007	*
66	x416	0.2988	0.0914	**
67	x417	0.5110	0.0027	*
68	x418	0.0491	0.7855	Tidak Signifikan
69	x419	0.1678	0.3492	Tidak Signifikan
70	x420	0.1591	0.3750	Tidak Signifikan
71	x421	0.0568	0.7528	Tidak Signifikan
72	x501	0.7323	0.0000	*
73	x502	0.2968	0.0937	**
74	x503	0.8125	0.0000	*
75	x504	0.7697	0.0000	*
76	x505	0.7818	0.0000	*
77	x506	0.0642	0.7219	Tidak Signifikan
78	x507	0.7751	0.0000	*
79	x508	0.6895	0.0000	*
80	x509	0.6076	0.0002	*

Catatan :

\* = Signifikan pada taraf uji 5 persen

\*\* = Signifikan pada taraf uji 10 persen

Validator : u1 = jumlah penduduk



### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.2. HASIL UJI RELIABILITAS

##### C.2.1. UJI RELIABILITAS PER DIMENSI

Variabel	DIMENSI SUMBER DAYA ALAM				
	Tahapan Pemilihan Variabel				
	I	II	III	IV	V
1 x101	0,6236				
2 x102	0,3959				
3 x103	0,4691				
4 x104	0,6019				
5 x109	0,4036				
6 x110	0,3332				
$r_{ij} - \tau_{urij}$	0,2634				
$r_{kk}$	0,8424				
k	6				

*k = Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis*

### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.2. HASIL UJI RELIABILITAS

##### C.2.1. UJI RELIABILITAS PER DIMENSI

DIMENSI INFRASTRUKTUR					
Variabel	Tahapan Pemilihan Variabel				
	I	II	III	IV	V
1 x201	0,5756	0,5875	0,6210	0,6229	0,6197
2 x202	0,4886	0,5040	0,5271	0,5331	0,5379
3 x204	0,6510	0,6683	0,6968	0,7065	0,7218
4 x205	0,6745	0,6903	0,7086	0,7295	0,7701
5 x206	0,6013	0,6161	0,6247	0,6486	0,6969
6 x207	0,5907	0,6035	0,6230	0,6477	0,6963
7 x208	0,6634	0,6816	0,6922	0,7092	0,7415
8 x209	0,4885	0,4964	0,5076	0,5202	0,5450
9 x210	0,5093	0,5188	0,5376	0,5360	0,5430
10 x211	0,6146	0,6194	0,6512	0,6715	0,7067
11 x212	0,6747	0,6902	0,7159	0,7351	0,7709
12 x213	0,6319	0,6471	0,6611	0,6817	0,7211
13 x214	0,5783	0,5834	0,6224	0,6339	0,6488
14 x215	0,6334	0,6376	0,6729	0,6919	0,7253
15 x216	0,5657	0,5841	0,5935	0,6120	0,6519
16 x217	0,5266	0,5218	0,5561	0,5755	0,6100
17 x218	0,5265	0,5204	0,5533	0,5665	0,5919
18 x219	0,3029				
19 x220	0,4096	0,4154	0,4478	0,4248	
20 x221	0,3981	0,4058	0,4365	0,4131	
21 x222	0,3499	0,3576	0,3814		
22 x223	0,5186	0,5256	0,5703	0,5601	0,5297
23 x224	0,3179	0,3232			
24 x225	0,3211	0,3280			
25 x226	0,5787	0,5965	0,5954	0,6130	0,6459
26 x227	0,6121	0,6251	0,6465	0,6607	0,6872
$r_{ij} - \tau_{urij}$	0,3067	0,3308	0,3960	0,4326	0,5114
$r_{kk}$	0,9671	0,9683	0,9710	0,9721	0,9747
k	26	25	23	22	20

$k$  = Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis

### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.2. HASIL UJI RELIABILITAS

##### C.2.1. UJI RELIABILITAS PER DIMENSI

Variabel	DIMENSI PEREKONOMIAN				
	Tahapan Pemilihan Variabel				
	I	II	III	IV	V
1 x302	0,4420	0,4176			
2 x304	0,2433				
3 x305	0,4490	0,4871	0,5469		
4 x306	0,6164	0,6932	0,7418		
5 x307	0,6554	0,7140	0,7281		
6 x308	0,6112	0,6748	0,7014		
7 x310	0,4654	0,4983	0,5222		
8 x311	0,6180	0,6881	0,7399		
9 x312	0,6237	0,6699	0,6956		
$r_{ij} - \text{Tau}_{rij}$	0,2918	0,4212	0,5187		
$r_{kk}$	0,9086	0,9247	0,9337		
k	9	8	7		

*k = Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis*

### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.2. HASIL UJI RELIABILITAS

##### C.2.1. UJI RELIABILITAS PER DIMENSI

DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA					
Variabel	Tahapan Pemilihan Variabel				
	I	II	III	IV	V
1 x401	0,5794	0,5945	0,5727		
2 x402	0,4723	0,4839	0,5378		
3 x408	0,5537	0,5742	0,5935		
4 x410	0,2597				
5 x411	0,6283	0,6474	0,6557		
6 x412	0,3425	0,3530			
7 x413	0,6832	0,7383	0,7898		
8 x414	0,6636	0,7195	0,7737		
9 x415	0,6714	0,7272	0,7783		
10 x416	0,5420	0,5957	0,6484		
11 x417	0,6394	0,6955	0,7510		
$r_{ij} - \text{Tau}_{rij}$	0,2884	0,3759	0,4807		
$r_{kk}$	0,9304	0,9406	0,9499		
k	11	10	9		

*k = Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis*

### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.2. HASIL UJI RELIABILITAS

##### C.2.1. UJI RELIABILITAS PER DIMENSI

Variabel	DIMENSI KELEMBAGAAN DAN BUDAYA				
	Tahapan Pemilihan Variabel				
	I	II	III	IV	V
1 x501	0,5365				
2 x502	0,3966				
3 x503	0,6686				
4 x504	0,6833				
5 x505	0,6598				
6 x507	0,6212				
7 x508	0,5805				
8 x509	0,4213				
$r_{ij} - \text{Tau}_{rij}$	0,3963				
$r_{kk}$	0,9141				
k	8				

k = Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis.





## C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

### C.2. HASIL UJI RELIABILITAS

#### C.2.2. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN DIMENSI

Variabel	Tahapan Pemilihan Variabel				
	I	II	III	IV	V
1 x101	0,6503	0,6695	0,6748	0,6775	
2 x102	0,3374				
3 x103	0,4233	0,4367			
4 x104	0,6325	0,6524	0,6572	0,6590	
5 x109	0,2300				
6 x110	0,2675				
7 x201	0,5305	0,5609	0,5714	0,5801	
8 x202	0,4726	0,4933	0,5009	0,5112	
9 x204	0,6397	0,6754	0,6891	0,6968	
10 x205	0,6916	0,7262	0,7403	0,7479	
11 x206	0,6264	0,6503	0,6677	0,6753	
12 x207	0,6662	0,6963	0,7050	0,7099	
13 x208	0,6590	0,6915	0,7080	0,7164	
14 x209	0,5193	0,5401	0,5522	0,5508	
15 x210	0,4930	0,5172	0,5312	0,5261	
16 x211	0,6591	0,6890	0,6978	0,7020	
17 x212	0,7002	0,7363	0,7488	0,7560	
18 x213	0,6537	0,6892	0,7017	0,7074	
19 x214	0,5988	0,6286	0,6408	0,6434	
20 x215	0,6962	0,7260	0,7357	0,7384	
21 x216	0,5715	0,6047	0,6198	0,6266	
22 x217	0,5969	0,6231	0,6298	0,6309	
23 x218	0,5857	0,6103	0,6159	0,6147	
24 x223	0,4685	0,4956	0,5026	0,5072	
25 x226	0,5858	0,6109	0,6267	0,6302	
26 x227	0,6102	0,6422	0,6532	0,6622	
27 x305	0,4430	0,4605	0,4644		
28 x306	0,6227	0,6504	0,6589	0,6574	
29 x307	0,6647	0,6999	0,7144	0,7190	

### C. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### C.2. HASIL UJI RELIABILITAS

##### C.2.2. UJI RELIABILITAS KESELURUHAN DIMENSI

(lanjutan)

Variabel	Tahapan Pemilihan Variabel				
	I	II	III	IV	V
30 x308	0,6050	0,6381	0,6483	0,6482	
31 x310	0,5121	0,5370	0,5406	0,5465	
32 x311	0,6453	0,6698	0,6758	0,6770	
33 x312	0,5893	0,6222	0,6351	0,6391	
34 x401	0,6851	0,7161	0,7302	0,7354	
35 x402	0,4736	0,4989	0,5038	0,5014	
36 x408	0,6274	0,6535	0,6606	0,6683	
37 x411	0,6767	0,7041	0,7146	0,7212	
38 x413	0,6001	0,6213	0,6172	0,6184	
39 x414	0,5637	0,5835	0,5776	0,5790	
40 x415	0,5811	0,6021	0,5967	0,5994	
41 x416	0,4076	0,4198			
42 x417	0,5525	0,5721	0,5672	0,5667	
43 x501	0,5328	0,5502	0,5630	0,5699	
44 x502	0,2985				
45 x503	0,6766	0,7036	0,7135	0,7175	
46 x504	0,6739	0,7050	0,7141	0,7192	
47 x505	0,6585	0,6859	0,6946	0,7009	
48 x507	0,5939	0,6227	0,6357	0,6410	
49 x508	0,4654	0,4912	0,5087	0,5189	
50 x509	0,4907	0,5214	0,5285	0,5311	
$r_{ij} - \text{Tau}_{ij}$	0,3701	0,4567	0,4863	0,4994	
$r_{kk}$	0,9848	0,9866	0,9870	0,9871	
k	50	46	44	43	

k = Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis.

#### D. VARIABEL YANG LOLOS UJI VALIDITAS, UJI RELIABILITAS, DAN SELEKSI VARIABEL NORMATIF

NO	VARIABEL	
	LABEL	NAMA
<b>DIMENSI SUMBER DAYA ALAM</b>		
1	x101	Luas Wilayah per kapita
2	x104	Luas kawasan hutan per kapita
<b>DIMENSI INFRASTRUKTUR</b>		
1	x201	Jumlah RS per kabupaten
2	x202	Jumlah poliklinik/ balai pengobatan per kecamatan
3	x204	Jumlah Bank umum per kabupaten
4	x205	Persentase desa menurut ketersediaan mini market
5	x206	Persentase desa menurut ketersediaan restoran/ rumah makan
6	x207	Persentase desa menurut ketersediaan hotel
7	x208	Persentase desa menurut ketersediaan Kelompok Pertokoan
8	x209	Persentase desa menurut ketersediaan Pasar dengan Bangunan Permanen
9	x210	Persentase desa menurut ketersediaan Kios Sarana Produksi Pertanian
10	x211	Persentase desa menurut ketersediaan wartel
11	x212	Persentase desa menurut ketersediaan warnet
12	x213	Persentase desa menurut ketersediaan kantor Pos/ Kantor Pos Pembantu

**D. VARIABEL YANG LOLOS UJI VALIDITAS, UJI RELIABILITAS, DAN SELEKSI VARIABEL NORMATIF***(lanjutan)*

NO	VARIABEL	
	LABEL	NAMA
<b>DIMENSI INFRASTRUKTUR</b>		
13	x214	Persentase desa menurut ketersediaan Pos Keliling
14	x215	Persentase desa yang ketersediaan sinyal telepon genggam kuat
15	x216	Jumlah kendaraan bermotor per desa
16	x217	Persentase desa/kelurahan yang jenis permukaan jalan terluas berupa aspal/beton/ diperkeras
17	x218	Persentase desa yang ketersediaan jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun
18	x223	Jumlah Perguruan Tinggi
19	x226	Persentase desa yang tersedia lapangan bulu tangkis
20	x227	Persentase desa menurut keberadaan gedung bioskup
<b>DIMENSI PEREKONOMIAN</b>		
1	x301	PDRB Nominal per kapita
2	x306	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Usaha Kecil (KUK)
3	x307	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
4	x308	Persentase desa yang menurut ketersediaan Kredit Lainnya
5	x310	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Industri Kecil & Kerajinan Rakyat
6	x311	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Simpan Pinjam
7	x312	Persentase desa yang menurut ketersediaan Koperasi Non KUD

**D. VARIABEL YANG LOLOS UJI VALIDITAS, UJI RELIABILITAS, DAN SELEKSI VARIABEL NORMATIF***(lanjutan)*

NO	VARIABEL	
	LABEL	NAMA
<b>DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
1	x401	Jumlah penduduk per desa
2	x402	Persentase penduduk usia kerja " 15 tahun ke atas"
3	x408	Persentase penduduk bekerja di sektor manufaktur
4	x411	Jumlah dokter per desa
5	x413	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG
6	x414	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi DPT
7	x415	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Polio
8	x417	Persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Hepatitis B
<b>DIMENSI KELEMBAGAAN DAN BUDAYA</b>		
1	x501	Persentase desa menurut keberadaan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat "LSM"
2	x503	Persentase desa yang dapat menerima program TVRI
3	x504	Persentase desa yang dapat menerima program TV Swasta Nasional
4	x505	Persentase desa yang dapat menerima program TV Lokal
5	x507	Persentase desa yang mengalami tindak kejahatan pencurian
6	x508	Persentase desa yang mengalami tindak kejahatan narkoba
7	x509	Persentase desa yang mempunyai ketersediaan tempat penampungan sampah sementara

*k= Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis*



**E. BOBOT VARIABEL PADA PENGHITUNGAN INDEKS KOMPOSIT PER DIMENSI DAN KESELURUHAN DIMENSI**

NO	VARIABEL	PEMBOBOT	
		DIMENSI	KESELURUHAN
<b>DIMENSI SUMBER DAYA ALAM</b>			
1	x101	1/2	1/17
2	x104	1/2	1/17
<b>DIMENSI INFRASTRUKTUR</b>			
1	x201	1/12	1/34
2	x202	1/12	1/34
3	x204	1/42	1/119
4	x205	1/42	1/119
5	x206	1/42	1/119
6	x207	1/42	1/119
7	x208	1/42	1/119
8	x209	1/42	1/119
9	x210	1/42	1/119
10	x211	1/30	1/85
11	x212	1/30	1/85
12	x213	1/30	1/85
13	x214	1/30	1/85
14	x215	1/30	1/85
15	x216	1/18	1/51
16	x217	1/18	1/51
17	x218	1/18	1/51
18	x223	1/6	1/17
19	x226	1/12	1/34
20	x227	1/12	1/34



**E. BOBOT VARIABEL PADA PENGHITUNGAN INDEKS KOMPOSIT PER DIMENSI DAN KESELURUHAN DIMENSI**

(lanjutan)

NO	VARIABEL	PEMBOBOT	
		DIMENSI	KESELURUHAN
<b>DIMENSI PEREKONOMIAN</b>			
1	x301	1/2	1/17
2	x306	1/12	1/102
3	x307	1/12	1/102
4	x308	1/12	1/102
5	x310	1/12	1/102
6	x311	1/12	1/102
7	x312	1/12	1/102
<b>DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1	x401	1/6	1/34
2	x402	1/6	1/34
3	x408	1/3	1/17
4	x411	1/15	1/85
5	x413	1/15	1/85
6	x414	1/15	1/85
7	x415	1/15	1/85
8	x417	1/15	1/85
<b>DIMENSI KELEMBAGAAN DAN BUDAYA</b>			
1	x501	1/4	1/17
2	x503	1/12	1/51
3	x504	1/12	1/51
4	x505	1/12	1/51
5	x507	1/8	1/34
6	x508	1/8	1/34
7	x509	1/4	1/17

*k* = Banyaknya variabel yang digunakan dalam analisis.

## F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN

### F.1. DIMENSI SUMBER DAYA ALAM

Provinsi	Pola Pemb	Ukuran Pemb	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
94. Papua	0,00000	0,00000	1
91. Papua Barat	0,61714	0,04104	2
62. Kalimantan Tengah	2,25347	0,14987	3
64. Kalimantan Timur	2,76057	0,18359	4
81. Maluku	3,37944	0,22475	5
82. Maluku Utara	3,43975	0,22876	6
61. Kalimantan Barat	3,54650	0,23586	7
72. Sulawesi Tengah	3,72679	0,24785	8
14. Riau	3,86858	0,25728	9
74. Sulawesi Tenggara	3,90232	0,25953	10
76. Sulawesi Barat	3,96489	0,26369	11
15. Jambi	3,97093	0,26409	12
11. Nanggroe Aceh D.	4,02713	0,26783	13
19. Kep. Bangka Belitung	4,04370	0,26893	14
75. Gorontalo	4,06429	0,27030	15
16. Sumatera Selatan	4,07674	0,27112	16
17. Bengkulu	4,08268	0,27152	17
63. Kalimantan Selatan	4,09877	0,27259	18
53. Nusa Tenggara Timur	4,12524	0,27435	19
13. Sumatera Barat	4,13096	0,27473	20
21. Kep Riau	4,17802	0,27786	21
71. Sulawesi Utara	4,18587	0,27838	22
73. Sulawesi Selatan	4,19569	0,27904	23
12. Sumatera Utara	4,21236	0,28014	24

## F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN

### F.1. DIMENSI SUMBER DAYA ALAM

Provinsi	Pola Pemb	Ukuran Pemb	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
52. Nusa Tenggara Barat	4,23846	0,28188	25
18. Lampung	4,24577	0,28237	26
51. Bali	4,30209	0,28611	27
35. Jawa Timur	4,30709	0,28644	28
36. Banten	4,31276	0,28682	29
33. Jawa Tengah	4,31301	0,28684	30
32. Jawa Barat	4,31555	0,28701	31
34. DI Yogyakarta	4,31703	0,28711	32
31. DKI Jakarta	4,32780	0,28782	33

**F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN**  
**F.2. DIMENSI INFRASTRUKTUR**

<b>Provinsi</b>	<b>Pola Pemb</b>	<b>Ukuran Pemb</b>	<b>Peringkat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
31. DKI Jakarta	0,19864	0,01598	1
32. Jawa Barat	2,63363	0,21189	2
34. DI Yogyakarta	2,76402	0,22239	3
33. Jawa Tengah	2,99062	0,24062	4
35. Jawa Timur	3,02217	0,24316	5
13. Sumatera Barat	3,16525	0,25467	6
36. Banten	3,24925	0,26142	7
51. Bali	3,32026	0,26714	8
12. Sumatera Utara	3,48457	0,28036	9
18. Lampung	3,55787	0,28626	10
73. Sulawesi Selatan	3,57319	0,28749	11
14. Riau	3,57903	0,28796	12
19. Kep. Bangka Belitung	3,60366	0,28994	13
52. Nusa Tenggara Barat	3,62511	0,29167	14
16. Sumatera Selatan	3,63993	0,29286	15
21. Kep Riau	3,74183	0,30106	16
15. Jambi	3,76843	0,30320	17
71. Sulawesi Utara	3,81641	0,30706	18
63. Kalimantan Selatan	3,83203	0,30831	19
17. Bengkulu	3,87031	0,31139	20
64. Kalimantan Timur	3,87599	0,31185	21
75. Gorontalo	3,88947	0,31294	22
11. Nanggroe Aceh D.	3,99086	0,32109	23

**F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****F.2. DIMENSI INFRASTRUKTUR**

<b>Provinsi</b>	<b>Pola Pemb</b>	<b>Ukuran Pemb</b>	<b>Peringkat</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
72. Sulawesi Tengah	4,00015	0,32184	24
74. Sulawesi Tenggara	4,08009	0,32827	25
76. Sulawesi Barat	4,12525	0,33191	26
61. Kalimantan Barat	4,13111	0,33238	27
62. Kalimantan Tengah	4,16800	0,33535	28
53. Nusa Tenggara Timur	4,16967	0,33548	29
81. Maluku	4,34410	0,34951	30
82. Maluku Utara	4,35508	0,35040	31
91. Papua Barat	4,51557	0,36331	32
94. Papua	4,59264	0,36951	33

**F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN**  
**F.3. DIMENSI PEREKONOMIAN**

<b>Provinsi</b>	<b>Pola Pemb</b>	<b>Ukuran Pemb</b>	<b>Peringkat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
31. DKI Jakarta	0,51335	0,04350	1
64. Kalimantan Timur	1,46965	0,12452	2
14. Riau	2,07050	0,17543	3
51. Bali	2,29690	0,19461	4
21. Kep Riau	2,33083	0,19749	5
34. DI Yogyakarta	2,53577	0,21485	6
13. Sumatera Barat	2,70045	0,22881	7
32. Jawa Barat	2,85571	0,24196	8
52. Nusa Tenggara Barat	2,90139	0,24583	9
35. Jawa Timur	2,97557	0,25212	10
33. Jawa Tengah	3,07106	0,26021	11
36. Banten	3,17786	0,26926	12
19. Kep. Bangka Belitung	3,18002	0,26944	13
73. Sulawesi Selatan	3,25281	0,27561	14
71. Sulawesi Utara	3,39861	0,28796	15
15. Jambi	3,48290	0,29510	16
63. Kalimantan Selatan	3,49519	0,29614	17
16. Sumatera Selatan	3,50168	0,29669	18
94. Papua	3,50180	0,29670	19
61. Kalimantan Barat	3,55252	0,30100	20
12. Sumatera Utara	3,57703	0,30308	21
72. Sulawesi Tengah	3,58515	0,30376	22
62. Kalimantan Tengah	3,59923	0,30496	23

**F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****F.3. DIMENSI PEREKONOMIAN**

<b>Provinsi</b>	<b>Pola Pemb</b>	<b>Ukuran Pemb</b>	<b>Peringkat</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
11. Nanggroe Aceh D.	3,64503	0,30884	24
75. Gorontalo	3,67748	0,31159	25
18. Lampung	3,68595	0,31230	26
76. Sulawesi Barat	3,69761	0,31329	27
17. Bengkulu	3,70237	0,31370	28
74. Sulawesi Tenggara	3,72817	0,31588	29
91. Papua Barat	3,79302	0,32138	30
53. Nusa Tenggara Timur	3,87594	0,32840	31
82. Maluku Utara	4,02151	0,34074	32
81. Maluku	4,03276	0,34169	33

**F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****F.4. DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

<b>Provinsi</b>	<b>Pola Pemb</b>	<b>Ukuran Pemb</b>	<b>Peringkat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
31. DKI Jakarta	0,82648	0,06956	1
34. DI Yogyakarta	1,89331	0,15935	2
21. Kep Riau	2,19760	0,18496	3
36. Banten	2,37030	0,19949	4
33. Jawa Tengah	2,38138	0,20042	5
51. Bali	2,38243	0,20051	6
32. Jawa Barat	2,41875	0,20357	7
35. Jawa Timur	2,45245	0,20640	8
71. Sulawesi Utara	2,94563	0,24791	9
64. Kalimantan Timur	3,08045	0,25926	10
52. Nusa Tenggara Barat	3,08600	0,25973	11
18. Lampung	3,10836	0,26161	12
75. Gorontalo	3,29039	0,27693	13
19. Kep. Bangka Belitung	3,36122	0,28289	14
73. Sulawesi Selatan	3,38755	0,28511	15
16. Sumatera Selatan	3,42984	0,28866	16
17. Bengkulu	3,46345	0,29149	17
63. Kalimantan Selatan	3,47173	0,29219	18
13. Sumatera Barat	3,50471	0,29497	19
14. Riau	3,52671	0,29682	20
62. Kalimantan Tengah	3,56675	0,30019	21
15. Jambi	3,62512	0,30510	22
12. Sumatera Utara	3,65280	0,30743	23



## F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN

### F.4. DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Provinsi	Pola Pemb	Ukuran Pemb	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
91. Papua Barat	3,69683	0,31113	24
53. Nusa Tenggara Timur	3,76158	0,31658	25
72. Sulawesi Tengah	3,77699	0,31788	26
74. Sulawesi Tenggara	3,78316	0,31840	27
11. Nanggroe Aceh D.	3,82496	0,32192	28
61. Kalimantan Barat	3,86238	0,32507	29
76. Sulawesi Barat	3,97660	0,33468	30
82. Maluku Utara	4,14422	0,34879	31
81. Maluku	4,16686	0,35069	32
94. Papua	4,46617	0,37588	33

**F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****F.5. DIMENSI KELEMBAGAAN DAN BUDAYA**

<b>Provinsi</b>	<b>Pola Pemb</b>	<b>Ukuran Pemb</b>	<b>Peringkat</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
31. DKI Jakarta	1,09862	0,13136	1
51. Bali	2,28338	0,27303	2
21. Kep Riau	2,48686	0,29736	3
35. Jawa Timur	2,73848	0,32745	4
13. Sumatera Barat	2,77025	0,33124	5
33. Jawa Tengah	2,78432	0,33293	6
34. DI Yogyakarta	2,84574	0,34027	7
64. Kalimantan Timur	2,84669	0,34038	8
52. Nusa Tenggara Barat	2,85677	0,34159	9
36. Banten	2,98572	0,35701	10
71. Sulawesi Utara	3,01245	0,36021	11
73. Sulawesi Selatan	3,03619	0,36304	12
18. Lampung	3,04349	0,36392	13
32. Jawa Barat	3,06393	0,36636	14
19. Kep. Bangka Belitung	3,09020	0,36950	15
63. Kalimantan Selatan	3,11219	0,37213	16
75. Gorontalo	3,13053	0,37432	17
61. Kalimantan Barat	3,20417	0,38313	18
74. Sulawesi Tenggara	3,23526	0,38685	19
17. Bengkulu	3,24284	0,38775	20
53. Nusa Tenggara Timur	3,27527	0,39163	21
12. Sumatera Utara	3,30627	0,39534	22
16. Sumatera Selatan	3,36669	0,40256	23

## F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN

### F.5. DIMENSI KELEMBAGAAN DAN BUDAYA

Provinsi	Pola Pemb	Ukuran Pemb	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
72. Sulawesi Tengah	3,37021	0,40298	24
14. Riau	3,37399	0,40344	25
76. Sulawesi Barat	3,37765	0,40387	26
91. Papua Barat	3,38214	0,40441	27
81. Maluku	3,38550	0,40481	28
62. Kalimantan Tengah	3,41619	0,40848	29
15. Jambi	3,42625	0,40968	30
82. Maluku Utara	3,44026	0,41136	31
11. Nanggroe Aceh D.	3,44534	0,41197	32
94. Papua	3,75151	0,44858	33

**F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN****F.6. KESELURUHAN DIMENSI**

<b>Provinsi</b>	<b>Pola Pemb</b>	<b>Ukuran Pemb</b>	<b>Peringkat</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
31. DKI Jakarta	1,04401	0,11125	1
34. DI Yogyakarta	2,78545	0,29681	2
51. Bali	2,90591	0,30964	3
32. Jawa Barat	2,92096	0,31125	4
33. Jawa Tengah	2,99960	0,31963	5
35. Jawa Timur	3,00056	0,31973	6
21. Kep Riau	3,05935	0,32599	7
64. Kalimantan Timur	3,07908	0,32810	8
36. Banten	3,14885	0,33553	9
13. Sumatera Barat	3,19115	0,34004	10
52. Nusa Tenggara Barat	3,33620	0,35549	11
14. Riau	3,37814	0,35996	12
19. Kep. Bangka Belitung	3,44199	0,36677	13
73. Sulawesi Selatan	3,44962	0,36758	14
18. Lampung	3,45351	0,36799	15
71. Sulawesi Utara	3,46789	0,36953	16
91. Papua Barat	3,56076	0,37942	17
12. Sumatera Utara	3,56880	0,38028	18
16. Sumatera Selatan	3,57369	0,38080	19
63. Kalimantan Selatan	3,59083	0,38263	20
62. Kalimantan Tengah	3,59285	0,38284	21
75. Gorontalo	3,60080	0,38369	22
15. Jambi	3,65286	0,38924	23

## F. HASIL PENGHITUNGAN INDEKS DISPARITAS INPUT PEMBANGUNAN

### F.6. KESELURUHAN DIMENSI

Provinsi	Pola Pemb	Ukuran Pemb	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)
17. Bengkulu	3,65610	0,38958	24
94. Papua	3,70377	0,39466	25
61. Kalimantan Barat	3,72874	0,39732	26
72. Sulawesi Tengah	3,73157	0,39762	27
74. Sulawesi Tenggara	3,76659	0,40136	28
11. Nanggroe Aceh D.	3,79681	0,40458	29
53. Nusa Tenggara Timur	3,84742	0,40997	30
76. Sulawesi Barat	3,85394	0,41066	31
81. Maluku	3,93715	0,41953	32
82. Maluku Utara	3,95569	0,42151	33

